



**TINJAUAN PERENCANAAN PAJAK DAN BEBAN PAJAK TANGGUHAN
SERTA PENGARUHNYA TERHADAP MANAJEMEN LABA (STUDI
EMPIRIS PADA PERUSAHAAN SUB SEKTOR MAKANAN DAN
MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN
2013-2015)**

Skripsi

Dibuat Oleh :

Ikrima Ramadhan

0221 13 173

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS PAKUAN
BOGOR**

**JULI
2017**

ABSTRAK

IKRIMA RAMADHAN. 022113173. Tinjauan Perencanaan Pajak dan Beban Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris pada Perusahaan Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2015). Dibawah bimbingan KETUT SUNARTA dan PATAR SIMAMORA. 2017.

Perencanaan pajak merupakan usaha yang mencakup perencanaan perpajakan agar pajak yang dibayar oleh perusahaan benar-benar efisien, selain itu merupakan rangkaian strategi untuk mengatur akuntansi dan keuangan perusahaan untuk meminimalkan kewajiban perpajakan dengan cara-cara yang tidak melanggar peraturan perpajakan. Sedangkan Beban Pajak Tangguhan merupakan pajak yang kewajibannya ditunda sampai waktu yang ditentukan atau diperbolehkan, sebagai akibat dari perbedaan waktu (temporer) antara standar akuntansi dengan peraturan perpajakan. Tujuan penelitian ini (1) untuk mengetahui perencanaan pajak yang dilakukan perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2013-2015, (2) untuk mengetahui beban pajak tangguhan yang dilakukan perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2013-2015, (3) untuk mengetahui pengaruh dari perencanaan pajak dan beban pajak tangguhan terhadap manajemen laba pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2013-2015.

Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dan deskriptif, dengan jenis data sekunder. Dalam hal ini yang menjadi objek penelitian adalah variabel yang meliputi perencanaan pajak dan beban pajak tangguhan. Unit analisis yang digunakan adalah *organization*. Lokasi dalam penelitian ini adalah perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI. Adapun metode penarikan sampel menggunakan *purposive sampling* sehingga diperoleh 10 perusahaan dari 14 perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI. Metode analisis data dalam penelitian ini yaitu statistik, uji asumsi klasik, uji hipotesis dan analisis regresi linier berganda dengan menggunakan *software Microsoft Excel 2007* dan *SPSS 21*.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa perencanaan pajak tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Artinya perusahaan melakukan manajemen laba dengan menghindari penurunan laba, selain itu sepertinya perusahaan kurang merespon penurunan tarif pajak atau PPh badan yang telah diatur dalam UU No. 36 Tahun 2008. Kemudian beban pajak tangguhan berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Artinya setiap kenaikan beban pajak tangguhan, maka probabilitas perusahaan dalam melakukan manajemen laba akan mengalami peningkatan.

Saran bagi perusahaan sebaiknya laba dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi perusahaan untuk melihat kelangsungan hidup perusahaan dan dapat dijadikan dasar pertimbangan mengambil keputusan untuk periode mendatang. Sedangkan bagi investor, sebaiknya investor sebagai salah satu pemilik modal terlebih dahulu dapat mengetahui sinyal manajemen laba yang dilakukan perusahaan sehingga dapat mengambil keputusan yang tepat atas resiko investasinya dan menentukan pilihan atas investasi. Dan bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas penelitian dengan menambah sample dan periodenya.

Kata Kunci : Perencanaan Pajak, Beban Pajak Tangguhan, dan Manajemen Laba.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran ALLAH SWT, karena atas segala rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Tinjauan Perencanaan Pajak dan Beban Pajak Tangguhan serta Pengaruhnya Terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris Pada Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2015)”. Skripsi ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) pada jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan banyak-banyak terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Allah SWT. Segala puji bagi Allah atas segala nikmat dan hidayah-Nya, Tuhan semesta Alam yang senantiasa memberi petunjuk, kekuatan lahir dan batin, serta kesehatan sehingga proposal ini dapat terselesaikan dengan baik.
2. Kedua Orangtua dan keluarga tercinta, yang dengan segala pengorbanannya dan doa restu, dukungan, dan nasehat, yang merupakan dorongan moril paling efektif bagi kelanjutan studi penulis hingga saat ini.
3. Bapak Dr. Hendro Sasongko, AK., MM., CA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor.
4. Bapak Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA., CMA., CCSA., CA., CSEP., QIA. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor.
5. Ibu Retno Martanti Endah L, S.E.,M.Si. selaku Sekertaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor.
6. Bapak Ketut Sunarta, Ak., M.M., C.A. selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia memberikan waktunya yang sangat berharga untuk membimbing penulis selama menyusun skripsi ini.
7. Bapak Patar Simamora, S.E.,M.Si. selaku Komisi Pembimbing yang telah bersedia memberikan waktu, penghargaan, dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen, Staf Tata Usaha beserta Karyawan Perpustakaan di Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor.
9. Kedua sahabatku Annisa Rachmania dan Yanti Nurhotijah, yang sudah selalu bersama -sama dalam suka dan duka dibangku perkuliahan, terimakasih atas kebersamaannya.
10. Ketiga sahabatku Dewi Hartati, Mia Erliana, dan Seftira Rahayu, yang memberi dukungan motivasi dan semangat, selalu menemaniku dalam pembuatan skripsi ini.
11. seluruh teman-teman seperjuangan akuntansi angkatan 2013 yang tidak dapat peneliti sebut namanya satu persatu yang sama-sama berjuang mulai awal kuliah.

12. Teman-teman se-UKM yang tergabung dalam kelompok UKM Seni dan Budaya yang memberikan ilmu baru bagi peneliti.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran dan masukan bahkan kritikan yang membangun dari berbagai pihak.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini berguna bagi para pembaca dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Bogor, Juli 2017

DAFTAR ISI

	Hal.
JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Identifikasi dan Perumusan Masalah.....	7
1.2.1. Identifikasi Masalah.....	7
1.2.2. Perumusan Masalah.....	7
1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian	8
1.3.1. Maksud Penelitian	8
1.3.2. Tujuan Penelitian	8
1.4. Kegunaan Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Pajak	9
2.1.1. Pengertian Pajak.....	9
2.1.2. Fungsi Pajak.....	9
2.1.3. Jenis-jenis Pajak.....	10
2.2. Perencanaan Pajak	12
2.2.1. Pengertian Perencanaan Pajak.....	12
2.2.2. Motivasi Perencanaan Pajak	13
2.2.3. Manfaat Perencanaan Pajak	14
2.2.4. Tujuan Perencanaan Pajak	15
2.2.5. Strategi Perencanaan Pajak	15
2.2.6. Tahapan Pokok Perencanaan Pajak.....	15
2.3. Pajak Tangguhan	27
2.3.1. Akuntansi Pajak Penghasilan (PSAK NO. 46).....	27
2.3.2. Beban Pajak Tangguhan	27
2.3.2.1. Pengertian Pajak Tangguhan.....	17
2.4. Pengertian Laba	20
2.4.1. Menurut Akuntansi	20
2.5. Manajemen Laba	22
2.5.1. Pengertian Manajemen Laba	22

2.5.2. Motivasi Manajemen Laba	24
2.5.3. Pandangan Manajemen Laba.....	26
2.5.4. Pola Manajemen Laba	27
2.5.5. Pengukuran Manajemen laba	28
2.6. Penelitian Sebelumnya	30
2.7. Kerangka Pemikiran dan Hubungan antar Variabel	35
2.7.1. Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba	36
2.8.2. Beban Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba	37
2.8. Hipotesis Penelitian.....	38

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian.....	39
3.2. Objek, Unit Analisis, Dan Lokasi Penelitian	39
3.3. Jenis dan Sumber Data	39
3.4. Operasionalisasi Variabel.....	40
3.5. Metode Penarikan Sampel	41
3.6. Metode Pengumpulan Data	42
3.7. Metode Pengolahan/ Analisis Data	42
3.7.1. Uji Asumsi Klasik	42
3.8. Analisis Regresi Linier Berganda.....	43
3.8.1. Statistik Deskriptif Berganda	44
3.9. Pengujian Hipotesis.....	44
3.9.1. Uji Koefisien Determinasi (R^2)	44
3.9.2. Uji Statistik Secara Parsial (t)	44
3.9.3. Uji Pengaruh Secara Simultan (Uji Statistik f)	45

BAB IV HASIL PENELITIAN

4.1. Hasil Pengumpulan Data	47
4.1.1. Gambaran Umum Perusahaan.....	49
4.1.2. Pehitungan Perencanaan Pajak dan Beban Pajak Tangguhan	52
4.1.3. Perhitungan Manajemen Laba.....	55
4.2. Analisis Data	56
4.2.1. Analisis Statistik Deskriptif	56
4.2.2. Uji Asumsi Klasik	57
4.2.3. Uji Hipotesis Penelitian	62
4.2.4. Analisis Regresi Linier Berganda	64
4.3. Pembahasan.....	65
4.3.1. Pengaruh Perencanaan Pajak dan Beban Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba	65
4.4. Interpretasi Hasil Penelitian.....	66
4.4.1. Pengaruh Perencanaan Pajak terhadap Manajemen Laba	66
4.4.2. Pengaruh Beban Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba	67

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan	69
5.2. Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Daftar 10 Perusahaan dengan Rata-rata TRR, DTE, dan Perubahan Laba Tahun 2013	4
Tabel 2	Daftar 10 Perusahaan dengan Rata-rata TRR, DTE, dan Perubahan Laba Tahun 2014	5
Tabel 3	Daftar 10 Perusahaan dengan Rata-rata TRR, DTE, dan Perubahan Laba Tahun 2015	5
Tabel 4	Rata-rata TRR, DTE, dan Perubahan Laba Tahun 2013-2015	6
Tabel 5	Penelitian Sebelumnya	30
Tabel 6	Operasionalisasi Variabel	41
Tabel 7	Daftar 10 Perusahaan yang menjadi Objek Penelitian Makanan dan Minuman Periode 2013-2015	42
Tabel 8	Daftar 10 Perusahaan yang menjadi Objek Penelitian Makanan dan Minuman Periode 2013	48
Tabel 9	Perencanaan Pajak (<i>Tax Planning</i>)	53
Tabel 10	Beban Pajak Tangguhan (<i>Deferred Tax Expense</i>)	54
Tabel 11	Manajemen Laba (<i>Earning Management</i>)	42
Tabel 12	Analisis Statistik Deskriptif	56
Tabel 13	Uji Normalitas	59
Tabel 14	Uji Heterokedastitas	60
Tabel 15	Uji Multikolonieritas	61
Tabel 16	Uji Autokorelasi	61
Tabel 17	Uji Koefisien Determinasi (R^2)	62
Tabel 18	Uji Statistik t (Simultan)	63
Tabel 19	Uji Statistik f (Parsial)	64
Tabel 20	Regresi Linear Berganda	64
Tabel 21	Hasil Pengujian Hipotesis	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Pemikiran	36
Gambar 2 Uji Normalitas dengan Grafik Histogram	57
Gambar 3 Uji Normalitas dengan Grafik P-Plot	58
Gambar 4 Uji Heteroskedastitas dengan Scatterplot.....	59

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan keuangan menyediakan informasi yang handal, relevan, dan tepat waktu kepada para manajer, investor, serta kreditor sehingga sumber daya dapat dialokasikan ke perusahaan paling efisien. Laporan keuangan dihasilkan dari sistem akuntansi seperti neraca (*balance sheet*), laporan laba rugi (*profit and loss statement/income statement*), laporan arus kas (*statement of cash flow*), laporan perubahan ekuitas (*Statement of Changes in Equity*). (Waluyo, 2009). Namun laporan pokok yang digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan adalah neraca dan laba rugi. Bukan berarti bahwa laporan yang lain, seperti laporan arus kas, perubahan ekuitas tidak penting. Kedua laporan tersebut merupakan bagian dari laporan keuangan yang tidak bisa dipisahkan, namun ada laporan yang bisa menggambarkan kondisi riil perusahaan seperti laporan laba rugi dan neraca. Dapat dikatakan laporan keuangan merupakan instrumen penting bagi investor karena dengan membaca informasi keuangan yang ada didalam laporan keuangan tersebut para investor dan pengambil keputusan dapat menilai seberapa besar potensi perusahaan tersebut untuk mendapatkan prestasi yang lebih baik, mendapatkan kas yang lebih banyak, dan mengkonversi laba yang diperoleh menjadi kas dimasa yang akan datang.

Laba ini, merupakan tujuan utama dari sebuah perusahaan yang pada nantinya akan diubah dalam bentuk kas dan dibagikan kepada pemilik perusahaan dan investor. Namun laba tersebut merupakan perencanaan masa depan dari tujuan perusahaan dan masa depan sendiri sulit untuk diprediksi dikarenakan ketidak pastiannya. Walaupun dalam laporan keuangan sendiri memiliki sejumlah keterbatasan, diantaranya laporan keuangan berisi tentang peristiwa dimasa lalu yang dilaporkan pada periode yang berakhir (sekarang). Walau tidak cukup menjawab akan pentingnya informasi yang *up to date*, namun laporan keuangan menjadi acuan atau gambaran bagaimana keberlangsungan hidup perusahaan. Apabila selama beberapa periode terdapat pertumbuhan laba yang cukup signifikan, maka dapat diperkirakan prospek perusahaan ke depan dan akan memiliki siklus hidup lebih panjang walaupun hal tersebut tidak menjanjikan atau pasti. Sebaliknya apabila laba perusahaan terus mengalami penurunan, maka perusahaan perlu mengambil kebijakan strategis untuk mengatasi penurunan tersebut dengan cara melakukan peninjauan kembali apakah terjadi penyimpangan dalam alokasi pengeluaran perusahaan dan perlu memangkas biaya-biaya yang tidak memberikan kontribusi bagi perusahaan.

Disamping itu, tujuan yang ingin dicapai manajemen adalah mendapatkan laba yang tinggi. Hal ini berkaitan dengan bonus yang akan diperoleh oleh manajemen,

karena semakin tinggi laba yang diperoleh, maka akan semakin tinggi pula bonus yang akan diberikan oleh perusahaan kepada pihak manajemen sebagai sebagai pengelola secara langsung. Di lain pihak, informasi laba dapat membantu pemilik (*stackholder*) dalam mengestimasi *earning power* (kekuatan laba) untuk menaksir resiko dalam investasi dan kredit. Pentingnya informasi laba tersebut merupakan tanggung jawab dari pihak manajemen yang diukur kinerjanya dari pencapaian laba yang diperoleh.

Perilaku manajemen laba dimungkinkan dapat terjadi karena manajemen mempunyai informasi lebih banyak dan lebih akurat daripada pihak *stakeholder*. Hal ini senada dengan yang dikemukakan oleh Irham Fahmi (2014:517) bahwa Manajemen laba (*Earning Management*) adalah suatu tindakan yang mengatur laba sesuai dengan yang dikehendaki oleh pihak tertentu atau terutama oleh manajemen perusahaan (*company management*). Sedangkan menurut Mulford-Comiskey (2010, 81) manajemen laba adalah memanipulasi akuntansi dengan tujuan menciptakan kinerja perusahaan agar terkesan lebih baik dari yang sebenarnya. Manajemen laba dapat dilakukan melalui praktik perataan laba (*income smoothing*), *taking a bath*, dan *income maximization* (Scoot, 2000). Konsep mengenai manajemen laba dapat dijelaskan dengan menggunakan pendekatan teori keagenan (*agency theory*) yakni teori yang menyatakan bahwa praktik manajemen laba dipengaruhi oleh konflik kepentingan antara pihak yang berkepentingan (*principal*) dengan manajemen sebagai pihak yang menjalankan kepentingan (*agent*). Konflik ini muncul pada saat setiap pihak berusaha untuk mencapai tingkat kemakmuran yang diinginkannya. Teori dan manajemen laba tidak hanya berfokus pada angka-angka laporan keuangan tetapi berkembang pada upaya mengidentifikasi nilai etis dan tanggung jawab social penyusunan laporan keuangan.

Upaya perusahaan untuk merekayasa informasi melalui praktik manajemen laba telah menjadi faktor utama yang menyebabkan laporan keuangan tidak lagi mencerminkan nilai fundamental suatu perusahaan. Oleh karena itu, perekayasa laporan keuangan telah menjadi isu sentral sebagai sumber penyalahgunaan informasi yang dapat merugikan pihak-pihak yang berkepentingan. Itulah sebabnya informasi yang disampaikan terkadang diterima tidak sesuai dengan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Kondisi ini dikenal sebagai asimetri informasi (*information asymmetric*) yakni kondisi dimana ada ketidakseimbangan perolehan informasi antara pihak manajemen sebagai penyedia informasi dengan pemegang saham dan *stakeholders* (Hairu, 2009, 1).

Dengan adanya keinginan pihak manajemen untuk menekan dan membuat beban pajak sekecil mungkin, maka pihak manajemen cenderung untuk meminimalkan pembayaran pajak. Upaya untuk meminimalkan beban pajak secara eufimisme ini sering disebut dengan perencanaan pajak (*tax planning*) atau *tax sheltering*. Umumnya perencanaan pajak merujuk kepada proses merakayasa usaha dan transaksi wajib pajak supaya utang pajak berada dalam jumlah yang minimal

tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga perencanaan pajak (*tax planning*) merupakan tindakan yang legal selama dalam koridor undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Prof. Dr. Rochman Soemitro, S.H). Salah satu sektor pajak yang paling besar diperoleh Negara adalah pajak penghasilan. Untuk akuntansi pajak penghasilan, setiap perusahaan di Indonesia dalam membuat laporan keuangan diharuskan untuk mengikuti kaidah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang kredibel dan informatif kepada investor dan kreditor. Pajak penghasilan (PPH) merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang berasal dari pendapatan rakyat, merupakan wujud kewajiban kenegaraan dan peran serta rakyat dalam pembiayaan dan pembangunan nasional (Herry Purwono, 2010). Pajak penghasilan atas badan tergantung dari besarnya laba kena pajak pada suatu periode fiskal. Dibanyak Negara pelaporan keuangan dibuat atas dasar yang sama seperti SPT pajak, sedangkan di Indonesia sendiri laporan laba rugi dan neraca periode yang bersangkutan dilampirkan pada pelaporan SPT perusahaan. Hal itu sebagai acuan pemeriksaan apakah sudah sesuai besarnya pajak yang dibayar oleh perusahaan dengan laba kena pajak yang diperoleh.

Laporan keuangan perusahaan dihasilkan dan disiapkan sebagai pertanggung jawaban manajemen sehingga mencerminkan aktivitas perusahaan. Kewajiban tersebut tidak terbatas pada kepentingan manajemen tetapi juga untuk kepentingan otoritas pajak. Kebutuhan dalam standar akuntansi keuangan tidak selamanya sejalan dengan ketentuan perpajakan. Oleh Karena itu pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK No. 46 revisi 2012 tentang pajak penghasilan ini sebagai respon dengan diberlakukannya peraturan pajak penghasilan yang dikeluarkan oleh otoritas perpajakan.

Perusahaan makanan dan minuman merupakan salah satu kategori sektor industri di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang mempunyai peluang untuk tumbuh dan berkembang. Industri makanan dan minuman diprediksi akan membaik kondisinya. Hal ini terlihat semakin menjamurnya industri makanan dan minuman di negara ini khususnya semenjak memasuki krisis berkepanjangan. Barang konsumsi menjadi industri yang penting bagi perkembangan perekonomian bangsa. Hal ini tidak terlepas dari perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam industri barang konsumsi di Indonesia. Kegiatan-kegiatan dari perusahaan-perusahaan tersebut yang terus menerus untuk menyediakan berbagai makanan dan minuman yang sehat bagi masyarakat. Kondisi ini membuat persaingan semakin kuat, perusahaan dituntut untuk memiliki keunggulan kompetitif dari perusahaan lainnya. Perusahaan tidak hanya dituntut untuk menghasilkan produk yang bermutu bagi konsumen, tetapi juga mampu mengelola keuangannya dengan baik, artinya kebijakan pengelolaan

keuangan harus dapat menjamin keberlangsungan usaha perusahaan dan hal tersebut ditunjukkan dengan besarnya laba yang dicapai suatu perusahaan dan adanya keinginan dari manajemen untuk menekan dan membuat beban pajak sekecil mungkin, maka pihak manajemen cenderung untuk meminimalkan pembayaran pajak. Upaya untuk meminimalkan beban pajak ini sering disebut dengan perencanaan pajak (*tax planning*) (Suandy, 2008). Situasi inilah yang biasanya mendorong manajer untuk melakukan penyajian dan melaporkan informasi laba tersebut yang dikenal dengan praktik manajemen laba (*earning management*).

Berikut disajikan rata-rata TRR (Perencanaan Pajak), DTE (Beban Pajak Tangguhan, dan Perubahan Laba (Manajemen Laba) pada 10 sampel perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk periode 2013 sampai dengan 2015.

Tabel 1

Daftar Perusahaan yang menjadi Objek Penelitian Berdasarkan Rata-rata TRR, DTE, dan Perubahan Laba pada 10 Perusahaan Makanan dan Minuman Tahun 2013

No	Perusahaan	TRR	DTE	Perubahan Laba (ΔE)
1	CEKA	0,751780433	0,001563352	0,034775545
2	DLTA	0,754746345	0,007391192	0,013977942
3	INDF	0,731715606	0,008471629	-0,026565694
4	MLBI	0,74272026	0,034064553	18,9938365
5	MYOR	0,780502636	0,000050067	0,023892961
6	ROTI	0,749580621	0,001448158	0,006346
7	SKBM	0,744102575	0,001605013	0,137223036
8	SKLT	0,689249428	0,004272857	0,027967734
9	STTP	0,801385222	0,001157443	0,028942846
10	ULTJ	0,744475364	0,004573838	-0,007367914
Rata-rata		0,7490	0,0065	1,9233

Sumber : Hasil oleh data

Dari tabel 1 berdasarkan rata-rata TRR, DTE, dan perubahan laba di tahun 2013, TRR dengan jumlah rata-rata yaitu 0,7490, dan DTE sebesar 0,0065, jumlah ini diikuti dengan kenaikan perubahan laba sebesar 1,9233. Hal ini sesuai dengan teori bahwa semakin besar perencanaan pajak (TRR) dan beban pajak tangguhan (DTE) maka semakin besar pula perusahaan melakukan praktek manajemen laba (perubahan laba/ ΔE).

Tabel 2

Daftar Perusahaan yang menjadi Objek Penelitian Berdasarkan Rata-rata TRR, DTE, dan Perubahan Laba pada 10 Perusahaan Makanan dan Minuman Tahun 2014

No	Perusahaan	TRR	DTE	Perubahan Laba (ΔE)
1	CEKA	0,721011157	0,001035482	-0,139481562
2	DLTA	0,75903563	0,000482585	0,002958305
3	INDF	0,707273526	0,005191555	0,018452873
4	MLBI	0,737109808	0,006579139	-10,36229631
5	MYOR	0,773934786	0,000354744	-0,032552017
6	ROTI	0,746066319	0,00869975	0,005933152
7	SKBM	0,812366648	0,002376097	0,07659033
8	SKLT	0,701035834	0,006040435	0,043560007
9	STTP	0,736023473	0,002002789	0,004530144
10	ULTJ	0,754915805	0,007467188	-0,003236413
Rata-rata		0,7449	0,0040	-1,0386

Sumber : Hasil oleh data

Dari tabel 2 berdasarkan rata-rata TRR, DTE, dan perubahan laba di tahun 2014, TRR dengan jumlah rata-rata yaitu 0,7449, dan DTE sebesar 0,0040, jumlah ini diikuti dengan penurunan perubahan laba menjadi -1,0386. Di tahun 2014 terjadinya penurunan pada TRR dan DTE, dan perusahaan menekan lebih rendah perubahan labanya menjadi -1,0386.

Tabel 3

Daftar Perusahaan yang menjadi Objek Penelitian berdasarkan Rata-rata TRR, DTE, dan Perubahan Laba pada 10 Perusahaan Makanan dan Minuman Tahun 2015

No	Perusahaan	TRR	DTE	Perubahan Laba (ΔE)
1	CEKA	0,74891708	0,000488034	0,293772693
2	DLTA	0,76757367	0,005088291	-0,015444676
3	INDF	0,651281397	0,004414856	-0,021133404
4	MLBI	0,735538181	0,016327178	-0,011834391
5	MYOR	0,762107356	0,000337294	0,044972189
6	ROTI	0,715234753	0,004454876	0,011680945
7	SKBM	0,748660787	0,000215941	-0,054977843
8	SKLT	0,733000337	0,003475288	0,015494573
9	STTP	0,800434827	0,001615307	0,016451886
10	ULTJ	0,746565852	0,004805993	0,022340033
Rata-rata		0,7409	0,0041	0,0301

Sumber : Hasil oleh data

Dari tabel 3 berdasarkan rata-rata TRR, DTE, dan perubahan laba di tahun 2015 TRR mengalami penurunan kembali menjadi 0,7409 namun tidak diikuti dengan DTE yang jumlahnya sebesar 0,0041 maupun perubahan laba yang jumlahnya sebesar 0,0301 yang mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya. Hal ini tidak sesuai dengan teori yang telah ada, karena praktek manajemen laba akan semakin tinggi atau besar jika TRRnya ikut tinggi. Namun pada kasus ini TRR menurun tetapi DTE dan perubahan laba tetap naik.

Tabel 4
Rata-rata TRR, DTE, dan Perubahan Laba Pada 10 Perusahaan Makanan dan Minuman Periode 2013-2015

Tahun	2013	2014	2015
TRR	0,7490	0,7449	0,7409
DTE	0,0065	0,0040	0,0041
Perubahan Laba (ΔE)	1,9233	-1,0386	0,0301

Sumber : Hasil olah data

Dari tabel 4 menunjukkan bahwa tingkat TRR pada perusahaan makanan dan minuman yang terpilih menjadi sample yang cenderung menurun dimana pada tahun 2013 rata-rata TRR sebesar 0,7490. Sedangkan untuk tahun 2014 sebesar 0,7449 dan tahun 2015 menjadi 0,7409. Ini menunjukkan bahwa perusahaan sektor makanan dan minuman melakukan perencanaan pajak yang tujuannya untuk meminimalisasi kewajiban pajak, ini terbukti dari hasil perhitungan rata-rata bahwa TRR tidak lebih dari 1, yang artinya penggunaan laba bersih (*Net Income*) tidak lebih dari laba sebelum pajak (*Pretax Income*) dalam perencanaan pajak. Sedangkan untuk nilai rata-rata DTE pada tahun 2013 adalah 0,0065 dan mengalami penurunan di tahun 2014 menjadi 0,0040 kemudian mengalami peningkatan kembali yaitu menjadi 0,0041. Untuk rata-rata perubahan laba (ΔE) pada tahun 2013 yaitu 1,9233 lalu mengalami penurunan di tahun 2014 menjadi -1,0386, dan di tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 0,0301.

Secara teoritis apabila TRR maupun DTE semakin besar maka semakin besar pula perusahaan melakukan praktek manajemen laba. Tetapi pada kenyataannya tidak selalu TRR dan DTE yang semakin besar atau kecil berdampak pada semakin besarnya praktek manajemen laba. Apabila dilihat dari tabel 4 nilai rata-rata dari TRR dan DTE pada tahun 2013 mengalami kenaikan dan diikuti dengan kenaikan perubahan laba. Hal tersebut sesuai dengan teori dimana semakin besar tingkat TRR (perencanaan pajak) dan DTE (beban pajak tangguhan) maka semakin besar pula perusahaan melakukan manajemen laba. Sedangkan nilai rata-rata dari TRR dan DTE di tahun 2014 mengalami penurunan dan diikuti perubahan laba, ini sesuai dengan teori yang telah ada. Sebaliknya pada tahun 2015 TRR mengalami penurunan lagi namun tidak diikuti dengan DTE maupun perubahan laba, justru perubahan laba yang mengalami kenaikan. Fenomena ini tidak sesuai dengan teori yang telah ada, karena praktek manajemen laba akan semakin tinggi atau besar jika TRRnya ikut

tinggi. Namun pada kasus ini TRR menurun tetapi DTE dan perubahan laba tetap naik.

Penelitian ini merupakan replikasi penelitian sebelumnya yang dilakukan Herdawati pada tahun 2015 dengan judul Analisis Pengaruh Perencanaan Pajak dan Beban Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba (Studi Kasus pada Perusahaan Manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2012-2014). Variable yang diteliti dalam penelitian ini adalah Perencanaan Pajak dan Beban Pajak Tangguhan sebagai variable independen, sedangkan manajemen laba sebagai variable dependen. Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model pengambilan sampel dengan menggunakan purposive sampling dan metode analisis data menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan pajak memiliki pengaruh positif terhadap manajemen laba, begitupun dengan beban pajak tangguhan berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Artinya peningkatan perencanaan pajak dan beban pajak tangguhan mempengaruhi peningkatan peluang serta probabilitas perusahaan dalam melakukan manajemen laba. Akan tetapi, hasil pada analisis deskriptif menunjukkan bahwa memang terjadi manajemen laba dengan tujuan untuk menghindari pelaporan kerugian. Selain itu Hadi Kusuma Ningrat (2014) meneliti perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dan hasil penelitiannya bahwa beban pajak tangguhan tidak berpengaruh signifikan terhadap probabilitas perusahaan dalam melakukan manajemen laba. Kemudian peningkatan beban pajak tangguhan tidak mempengaruhi peningkatan probabilitas perusahaan dalam melakukan manajemen laba.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka dengan ini penulis bermaksud untuk melakukan penelitian kembali mengenai **“Tinjauan Perencanaan Pajak dan Beban Pajak Tangguhan serta Pengaruhnya terhadap Manajemen Laba”** dengan studi empiris pada perusahaan Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2015”.

1.2. Identifikasi dan Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan mengenai pengaruh perencanaan pajak dan beban pajak tangguhan, seberapa besarkah pengaruhnya tersebut terhadap perlakuan manajemen laba jika adanya perencanaan pajak dan beban pajak tangguhan. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perencanaan pajak yang dilakukan perusahaan Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2015?
2. Bagaimana beban pajak tangguhan yang dilakukan perusahaan Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2015?

3. Apakah perencanaan pajak dan beban pajak tangguhan berpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2015?

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud Penelitian ini adalah untuk menambah wawasan penulis serta memperoleh data dan informasi yang relevan dari perusahaan makanan dan minuman sebagai bahan yang akan digunakan dalam penyusunan skripsi ini.

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perencanaan pajak yang dilakukan perusahaan Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2015
2. Untuk mengetahui beban pajak tangguhan yang dilakukan perusahaan Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2015
3. Untuk mengetahui pengaruh dari perencanaan pajak dan beban pajak tangguhan terhadap manajemen laba pada perusahaan Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2015

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, diantaranya :

1. Kegunaan Teoritik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan penelitian yang berarti bagi mahasiswa akuntansi untuk memperluas pengetahuan mengenai perpajakan khususnya pada perencanaan pajak, beban pajak tangguhan, dan tindakan manajemen laba pada perusahaan-perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI

2. Kegunaan Praktek

a. Bagi Peneliti,

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai perpajakan khususnya pada perencanaan pajak, beban pajak tangguhan, dan tindakan manajemen laba pada perusahaan-perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI.

b. Bagi Manajemen

Temuan penelitian ini diharapkan dan dapat menjadi masukan kepada manajemen dalam meningkatkan persepsi positif kepada pengguna laporan keuangan terhadap kualitas laba akuntansi yang dilaporkan melalui pengelolaan perbedaan temporer dan perencanaan pajak.

c. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan literatur dan referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya terkait analisis perencanaan pajak dan beban pajak tangguhan terhadap manajemen laba.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pajak

2.1.1. Pengertian Pajak

Seiring dengan perkembangan perekonomian Indonesia akan diikuti pula dengan kebijakan-kebijakan di bidang pajak. Oleh karena itu, pajak merupakan fenomena yang selalu berkembang di masyarakat. Sehingga pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama. Pembangunan nasional yang merupakan kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. (Waluyo, 2013, 2)

Pajak merupakan salah satu dana terpenting bagi kesinambungan gerak roda pembangunan nasional yang antar lain terwujud dengan tersedianya sarana-sarana pelayan umum yang telah kita nikmati bersama. Ada beberapa pengertian pajak.

Menurut Andriani dalam Herry Purwono (2010, 7) pajak didefinisikan sebagai:

iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh mereka yang wajib membayarnya menurut peraturan, tanpa mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum terkait dengan tugas negara dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Sedangkan pengertian pajak menurut Soeparman Soemahamidjaja dalam Waluyo (2013, 3) menyatakan pajak adalah

Iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam kesejahteraan umum.

Dari beberapa pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa: (a) pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya; (b) dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah; (c) pajak dipungut oleh negara baik pemerinta pusat maupun daerah; (d) pajak yang diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bila dari pemasukan masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiaya *public investmen*; dan (e) pajak dapat pula membiayai tujuan yang tidak bujeter, yaitu fungsi mengatur.

2.1.2. Fungsi Pajak

Pajak bukan hanya dipungut untuk disetorkan ke kas negara tanpa ada realisasi. Akan tetapi pajak itu sendiri memiliki fungsi. Menurut Chairil Anwar Pohan (2014, 9) fungsi tersebut antara lain adalah sebagai berikut :

- 1) Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)
Fungsi *Budgetair* disebut dengan fungsi utama pajak atau fungsi fiskal, yaitu suatu fungsi dimana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang yang berlaku. Fungsi ini disebut sebagai fungsi utama karena fungsi inilah yang secara historis pertama kali timbul, berdasarkan fungsi ini pemerintah memungut dana dari penduduknya untuk membiayai berbagai kepentingan negara.
- 2) Fungsi *Regulerend*
Fungsi *Regulerend* disebut juga sebagai fungsi tambahan bagi pajak, yaitu suatu fungsi dalam mana pajak dipergunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Disebut fungsi tambahan karena fungsi ini adalah sebagai fungsi tambahan/ pelengkap dari fungsi yang utama, dan untuk mencapai tujuan tersebut maka pajak dipergunakan sebagai alat kebijakan pemerintah.

Menurut Abdul Halim, dkk (2016, 4) ada dua fungsi pajak yaitu:

- 1) Fungsi anggaran (*budgetair*)
Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
- 2) Fungsi mengatur (*cregulerend*)
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.
Contoh:
 - a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
 - b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

2.1.3. Jenis-jenis Pajak

Diaz Priantara (2012, 6) mengatakan bahwa dalam beberapa literatur ilmu keuangan negara dan pengantar ilmu hukum pajak terhadap perbedaan dan penggolongan pajak serta jenis-jenis pajak. Perbedaan pembagian atau penggolongan didasarkan pada suatu kriteria, seperti siapa yang membayar pajak, apakah beban pajak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, siapa yang memungut, serta sifat-sifat yang melekat pada pajak yang bersangkutan. Menurut Siti Resmi (2014, 7) terdapat berbagai jenis pajak yang dikelompokkan menjadi tiga yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutannya.

1) Menurut Golongan

Pajak dikelompokkan menjadi

- a. Pajak Langsung, pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada oranglain atau pihak lain. Pajak harus menjadi wajib pajak yang bersangkutan.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh). PPh dibayar atau ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut.

- b. Pajak Tidak Langsung, pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada oranglain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa.

Contoh:

Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN terjadi karena terdapat pertambahan nilai terhadap barang atau jasa . pajak ini dibayarkan oleh produsen atau pihak yang menjual barang, tetapi dapat dibebankan kepada konsumen baik secara eksplisit maupun implisit (dimasukkan dalam harga jual barang atau jasa).

Untuk menentukan apakah sesuatu termasuk pajak langsung atau pajak tidak langsung dalam arti ekonomis, yaitu dengan cara melihat ketiga unsur yang terdapat dalam kewajiban pemenuhan perpajakannya. Ketiga unsur tersebut terdiri atas:

- a. Penanggung jawab pajak, adalah orang yang secara formal yuridis diharuskan melunasi pajak;
- b. Penanggung jawab pajak, adalah orang yang dalam faktanya memikul terlebih dahulu beban pajaknya;
- c. Pemikul pajak, adalah orang yang menurut undang-undang harus dibebani pajak.

Jika ketiga unsur tersebut ditemukan pada seseorang, pajaknya disebut pajak langsung, sedangkan jika ketiga unsur tersebut terpisah atau terdapat pada lebih dari satu orang, pajaknya disebut pajak tidak langsung.

2) Menurut Sifat pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- a. Pajak Subjektif, pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subjeknya.
Contoh: Pajak Penghasilan (PPh). Dalam PPh terdapat Subjek Pajak (Wajib Pajak) orang pribadi. Pengenaan PPh untuk orang pribadi tersebut memerhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak (status perkawinan, banyaknya anak, dan tanggung jawab lainnya). Keadaan pribadi Wajib Pajak tersebut selanjutnya digunakan untuk menentukan besarnya penghasilan tidak kena pajak.

- b. Pajak Objektif, pajak yang pengenaannya memerlihatkan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerlihatkan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal.
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak, Bumi dan Bangunan (PBB).
- 3) Menurut Lembaga Pemungut pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
- a. Pajak Negara (Pajak Pusat), pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.
Contoh: PPh, PPN, PPnBM.
 - b. Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.
Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Buatan, Pajak Parkir, Pajak Air tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2.2. Perencanaan Pajak

2.2.1. Pengertian Perencanaan Pajak

Pada umumnya perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Lumbantoran (1996, 483) dalam Sumomba (2010) mendefinisikan manajemen pajak sebagai sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, akan tetapi jumlah pajak dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang akan diharapkan oleh pihak manajemen. Pada tahap ini, seseorang perencana pajak melakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan dengan tujuan untuk menyeleksi tindakan yang akan dilakukan untuk penghematan pajak.

Menurut Erly Suandy (2011, 6) perencanaan pajak didefinisikan:

Langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dari penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak.

Sedangkan menurut Chairil Anwar Pohan (2015, 13) perencanaan pajak didefinisikan

Usaha yang mencakup perencanaan perpajakan agar pajak yang dibayar oleh perusahaan benar-benar efisien. Selain itu merupakan rangkaian strategi untuk mengatur akuntansi dan keuangan perusahaan untuk

meminimalkan kewajiban perpajakan dengan cara-cara yang tidak melanggar peraturan perpajakan (*in legal way*). Dalam arti yang lebih luas meliputi keseluruhan fungsi manajemen perpajakan.

Menurut Nur Musdalifah (2013, 308) perencanaan pajak didefinisikan sebagai

Analisis sistematis dalam membedakan kebebasan pajak yang ditujukan untuk meminimalkan kewajiban pajak dalam periode perpajakan yang berjalan dan masa depannya. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa perencanaan pajak adalah analisis sistematis yang bertujuan untuk meminimalkan kewajiban perpajakan dengan cara yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.2.2. Motivasi Perencanaan Pajak

Menurut Chairil Anwar Pohan (2015, 18) beberapa hal yang memengaruhi perilaku wajib pajak untuk meminimumkan kewajiban pembayaran pajak mereka, baik secara legal maupun ilegal, yang kita sebut dengan *propensity of dishonesty* (diolah dari T.N. Srinivasan, “*Tax Evasion: A Model*”, dalam *Journal of Public Economics*, 1973, 339-346) adalah sebagai berikut:

- 1) Tingkat kerumitan suatu peraturan (*Complexity of rule*)
Makin rumit peraturan perpajakan, muncul kecenderungan wajib pajak untuk menghindarinya karena biaya untuk memenuhinya (*compliance cost*) menjadi tinggi.
- 2) Besarnya pajak yang dibayar (*Tax required to pay*)
Makin besar jumlah pajak yang harus dibayar, akan makin besar pula kecenderungan wajib pajak untuk melakukan kecurangan dengan cara memperkecil jumlah pembayarannya.
- 3) Biaya untuk negoisasi (*Cost of bribe*)
Disengaja atau tidak, kadang-kadang wajib pajak melakukan negoisasi dan memberikan uang sogokan kepada fiskus dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Makin tinggi uang sogokan yang dibayarkan, semakin kecil pula kecenderungan wajib pajak melakukan pelanggaran.
- 4) Risiko deteksi (*Probability of detection*)
Risiko deteksi ini berhubungan dengan tingkat probabilitas apakah pelanggaran ketentuan perpajakan ini akan terdeteksi atau tidak. Makin rendah risiko terdeteksi, wajib pajak cenderung untuk melakukan pelanggaran. Sebaliknya, bila suatu pelanggaran mudah diketahui, wajib pajak akan memilih posisi konservatif dengan tidak melanggar aturan.
- 5) Besarnya denda (*Size of penalty*)
Makin besar sanksi perpajakan yang bisa dikenakan, maka wajib pajak akan cenderung mengambil posisi konservatif dengan tidak melanggar ketentuan perpajakan. Sebaliknya makin ringan sanksi atau bahkan ketiadaan sanksi atas

pelanggaran yang dilakukan wajib pajak, maka kecenderungan untuk melanggar akan lebih besar.

6) Moral masyarakat

Moral masyarakat akan memberi warna tersendiri dalam menentukan kepatuhan dan kesadaran mereka dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

2.2.3. Manfaat Perencanaan Pajak

Ada beberapa manfaat yang bisa diperoleh dari perencanaan pajak yang dilakukan secara cermat. Menurut Chairil Anwar Pohan (2015, 20) diantaranya adalah:

- 1) Penghematan kas keluar, karena beban pajak yang merupakan unsur biaya dapat dikurangi.
- 2) Mengatur aliran kas masuk dan keluar (*cash flow*), karena dengan perencanaan pajak yang matang dapat diperkirakan kebutuhan kas untuk pajak, dan menentukan saat pembayarab sehingga perusahaan dapat menyusun anggran kas secara lebih akurat.

2.2.4. Tujuan Perencanaan Pajak

Menurut Erly Suandy (2011, 7) jika tujuan perencanaan pajak adalah merekayasa agar beban pajak (*Tax burden*) dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada tetapi berbeda dengan pembuat undang-undang, maka perencanaan pajak di sini sama dengan *tax avoidance* karena secara hakikat ekonomis keduanya berusaha untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak (*after tax return*) karena pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia baik untuk dibagikan kepada pemegang saham maupun untuk diinvestasikan kembali.

Menurut Chairil Anwar Pohan (2015, 21) secara umum tujuan pokok yang ingin dicapai dari manajemen pajak/ perencanaan pajak yang baik adalah:

- 1) Meminimalkan beban pajak yang terutang.
- 2) Tindakan yang harus diambil dalam rangka perencanaan pajak tersebut berupa usaha-usaha mengefisiensikan beban pajak yang masih dalam ruang lingkup pemajakan dan tidak melanggar peraturan perpajakan.
- 3) Memaksimalkan laba setelah pajak
- 4) Meminimalkan terjadinya kejutan pajak (*tax surprise*) jika terjadi pemeriksaan pajak oleh fiskus.
- 5) Memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar, efisien, dan efektif, sesuai dengan ketentuan perpajakan, yang antara lain meliputi:
 - a. Mematuhi segala ketentuan administratif, sehingga terhindar dari pengenaan sanksi, baik sanksi administratif maupun pidana, seperti bunga, kenaikan, denda, dan hukum kurungan, atau penjara.

- b. Melaksanakan secara efektif segala ketentuan undang-undang perpajakan yang terkait dengan pelaksanaan pemasaran, pembelian, dan fungsi keuangan, seperti pemotongan dan pemungutan pajak (PPH pasal 21, pasal 22, dan pasal 23).

2.2.5. Strategi Perencanaan Pajak

Menurut Suandy (2008, 9) apabila dalam *tax planning* telah diketahui faktor-faktor yang akan dimanfaatkan untuk melakukan penghematan pajak, maka langkah-langkah selanjutnya adalah mengimplementasikannya baik secara formal maupun material. Adapun strategi-strategi dalam melakukan perencanaan pajak yaitu :

- 1) *Tax saving*, yakni upaya wajib pajak mengelakkan hutang pajaknya dengan jalan menahan diri untuk tidak membeli produk-produk yang ada pajak pertambahan nilainya atau dengan sengaja mengurangi jam kerja atau pekerjaan yang dapat dilakukannya sehingga penghasilannya menjadi kecil dan dengan demikian terhindar dari pengenaan pajak penghasilan yang besar.
- 2) *Tax avoidance*, yakni upaya wajib pajak untuk tidak melakukan perbuatan yang dikenakan pajak atau upaya-upaya yang masih dalam kerangka ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terhutang.
- 3) Menghindari Pelanggaran Atas Peraturan Perpajakan, yakni dengan menguasai peraturan pajak yang berlaku, perusahaan dapat menghindari timbulnya sanksi perpajakan yaitu sanksi administrasi berupa denda, bunga atau kenaikan dan sanksi denda pidana atau kurungan.
- 4) Menunda Pembayaran Kewajiban Pajak, yakni dengan menunda pembayaran kewajiban pajak tanpa melanggar peraturan berlaku dapat dilakukan melalui penundaan pembayaran PPN. Penundaan ini dilakukan dengan menunda penerbitan faktur pajak keluaran hingga batas waktu yang diperkenankan.
- 5) Mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan. Misalnya, PPh Pasal 22 atau pembelian solar dan impor dan fiskal luar negeri atas perjalanan dinas pegawai.

2.2.6. Tahapan Pokok Perencanaan Pajak

Dalam arus globalisasi dan tingkat persaingan yang semakin tinggi seorang manajer dalam membuat suatu perencanaan pajak sebagaimana strategi perencanaan perusahaan secara keseluruhan (*global company's strategy*) harus memperhitungkan adanya kegiatan yang bersifat lokal maupun internasional. Oleh karena itu, agar perencanaan pajak dapat berhasil sesuai dengan harapan, maka rencana itu seharusnya dilakukan melalui berbagai urutan tahap-tahapan. Menurut Chairil Anwar Pohan (2015, 27) agar *tax plan* sesuai harapan, Barry Spitz (1983, 86) mengemukakan tahap-tahap yang harus ditempuh, yakni:

- 1) *Analysis of the existing data base* (Melakukan analisis *data base* yang ada)
Design of one or more possible tax plans (Membuat satu model atau lebih rencana besarnya pajak)

- 2) *Evaluating a tax plans* (Melakukan evaluasi atas perencanaan pajak)
- 3) *Debugging the tax plans* (Mencari kelemahan dan memperbaiki kembali rencana pajak)
- 4) *Updating the tax plans* (Memutakhirkan rencana pajak)

Tahapan pertama, merupakan tahap analisis terhadap komponen-komponen yang berbeda pengakuannya antara komersial dan fiskal, dan menghitung seakurat mungkin beban pajak yang harus ditanggung perusahaan. Analisis ini dilakukan dengan mempertimbangan masing-masing elemen pajak, baik secara sendiri-sendiri maupun secara total pajak yang nantinya akan dirumuskan sebagai perencanaan pajak yang paling efisien.

Tahap kedua, setelah melakukan tahapan awal, harus dibuat beberapa model perencanaan pajak yang akan dilakukan. Pembuatan model-model perencanaan pajak tersebut dimaksudkan sebagai alternatif untuk menentukan *tax plan* mana yang *applicable* dan paling efisien dan efektif untuk diimplementasikan.

Tahap ketiga, tahap evaluasi perencanaan pajak tahap evaluasi yang sekaligus merupakan tahap pengendalian pajak ini merupakan langkah akhir dalam manajemen pajak. Pengendalian pajak bertujuan untuk memastikan bahwa kewajiban pajak telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan dan telah memenuhi persyaratan formal maupun material.

Tahap keempat, dalam konsep manajemen, pengawasan atau pengendalian (*controlling*) dapat dilakukan dengan dua cara, pengawasan preventif dan pengawasan represif. Mencari kelemahan dan memperbaiki kembali rencana pajak (*tax plan*) adalah bentuk pengawasan refresif. Mencari kelemahan dan memperbaiki kembali rencana pajak (*tax plan*) adalah bentuk pengawasan refresif.

Tahap kelima, dalam melaksanakan perencanaan pajak, perlu diproyeksikan perubahan yang terjadi saat ini dan yang akan datang dalam *tax plan*. *Tax plan* tersebut harus tersebut harus dimutakhirkan sesuai dengan ketentuan terkini, sehingga akibat yang merugikan dari adanya perubahan dan perkembangan tersebut dapat sedini mungkin diantisipasi. Dengan pemutakhiran, diharapkan perencanaan pajak yang sedang berjalan tidak akan mengalami hambatan yang berarti.

2.3. Pajak Tangguhan

2.3.1. Akuntansi Pajak Penghasilan (PSAK NO. 46)

Pada dasarnya antara akuntansi pajak dan akuntansi keuangan memiliki kesamaan tujuan, yaitu untuk menetapkan hasil operasi bisnis dengan pengukuran dan rekognisi penghasilan dan biaya, namun ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian, bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tidak sekedar instrumen pertransfer sumber daya (fungsi *budgeter*), akan tetapi acapkali pula digunakan untuk tujuan mempengaruhi perilaku wajib pajak untuk investasi, kesejahteraan dan lain-lain (fungsi mengatur) yang kadang-kadang

merupakan alasan untuk membenarkan penyimpangan dari standar akuntansi keuangan. Standar akuntansi keuangan mengatur masalah pajak tangguhan tersebut di PSAK 46 Akuntansi Pajak Penghasilan, yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan perhitungan pajak penghasilan terutang. Dian Sari (2014, 289)

Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak dan dihitung berdasarkan peraturan perpajakan. Berkaitan dengan hal tersebut PSAK juga turut mengatur masalah perhitungan pajak termasuk pajak penghasilan yaitu tahun 1998, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 46 (PSAK 46) mengenai akuntansi PPh. Selanjutnya perlakuan akuntansi untuk pajak tangguhan diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 46 (selanjutnya disebut dengan PSAK No. 46) tentang Akuntansi Pajak Penghasilan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia pada tahun 1997. PSAK No. 46 diberlakukan secara efektif mulai tanggal 1 Januari 1999 bagi perusahaan yang *go public* dan mulai tanggal 1 Januari 2001 bagi perusahaan yang tidak *go public*.

2.3.2. Beban Pajak Tangguhan (*Deferred Tax Expense*)

2.3.2.1. Pengertian Pajak Tangguhan

Menurut Edy Suprianto (2012, 166) Akuntansi Pajak Tangguhan adalah pencatatan transaksi perusahaan yang berkaitan dengan kewajiban pajaknya dapat ditunda sampai periode atau waktu yang diperbolehkan. Hal ini disebabkan karena perbedaan temporer atau beda waktu pengakuan penghasilan atau biaya antara akuntansi komersial dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Menurut Waluyo (2008, 216) dalam Herdawati (2015) Pajak tangguhan merupakan jumlah pajak penghasilan yang terutang (*payable*) atau terpulihkan (*recoverable*) pada tahun mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dari sisa kompensasi kerugian yang dapat dikompensasikan. Pengakuan pajak tangguhan berdampak terhadap berkurangnya laba atau rugi bersih sebagai akibat adanya kemungkinan pengakuan beban pajak tangguhan dan manfaat pajak tangguhan.

Menurut PSAK No. 46, pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan untuk periode mendatang sebagai akibat dari perbedaan temporer (waktu) yang boleh dikurangkan dan sisa kompensasi kerugian. Sedangkan menurut PSAK No.46 (IAI, 2009, 8) Pajak tangguhan adalah saldo akun di neraca sebagai manfaat pajak yang jumlahnya merupakan jumlah estimasi yang akan dipulihkan dalam periode yang akan datang sebagai akibat adanya perbedaan temporer antara standar akuntansi keuangan dengan peraturan perpajakan dan akibat adanya saldo kerugian yang dapat dikompensasi pada periode mendatang.

Selain itu, menurut Muhammad Zain (2007) dalam Jayanto dan Kiswanto (2009) pajak tangguhan terjadi akibat perbedaan antara PPh terutang (pajak penghasilan yang dihitung berbasis pada penghasilan kena pajak yang sesungguhnya dibayar kepada pemerintah) dengan beban pajak penghasilan (pajak penghasilan yang dihitung berbasis penghasilan sebelum pajak) sepanjang menyangkut perbedaan temporer.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa beban pajak tangguhan adalah pajak yang kewajibannya ditunda sampai waktu yang ditentukan atau diperbolehkan, sebagai akibat dari perbedaan waktu (temporer) antara standar akuntansi keuangan dengan peraturan perpajakan dan akibat dari saldo kerugian yang dapat dikompensasikan pada periode mendatang.

Pajak tangguhan pada prinsipnya merupakan dampak dari PPh dimasa yang akan datang yang disebabkan perbedaan temporer (waktu) antara perlakuan akuntansi dan perpajakan serta kerugian fiskal yang masih dapat dikompensasikan di masa yang akan datang (*tax loss carry forward*) yang perlu disajikan dalam laporan keuangan suatu periode tertentu serta adanya perbedaan antara laba akuntansi yang berasal dari laporan keuangan komersial dengan laba fiskal yang berasal dari laporan keuangan fiskal. Dampak PPh di masa yang akan datang yang perlu diakui, dihitung, disajikan dan diungkapkan dalam laporan keuangan, naik laporan posisi keuangan maupun laporan laba komprehensif. Bila dampak pajak di masa datang tersebut tidak tersaji dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba komprehensif, akibatnya bisa saja laporan keuangan menyesatkan pembacanya. Perbedaan yang terjadi perhitungan laba akuntansi fiskal disebabkan laba fiskal didasarkan pada undang-undang perpajakan, sedangkan laba akuntansi didasarkan pada standar akuntansi. Beban pajak tangguhan ini sesungguhnya mencerminkan besarnya beda waktu yang telah dikalikan dengan suatu tarif pajak marginal. Beda waktu timbul karena adanya kebijakan akrual (*discretionary accruals*) tertentu yang diterapkan sehingga terdapat suatu perbedaan waktu pengakuan penghasilan atau biaya antara akuntansi dengan pajak. Oleh karena perbedaan ini maka terlebih dahulu harus disesuaikan antara laba akuntansi yang berasal dari laporan keuangan komersial dengan laba fiskal yang berasal dari laporan keuangan fiskal sebelum menghitung besarnya PKP. Proses penyesuaian laporan keuangan ini disebut dengan koreksi fiskal atau dapat juga disebut dengan rekonsiliasi laporan keuangan akuntansi dengan koreksi fiskal atau rekonsiliasi fiskal. Koreksi fiskal ini lebih dimaksudkan untuk meniadakan perbedaan antara laporan keuangan komersial yang disusun berdasarkan SAK dengan peraturan perpajakan, sehingga akan menghasilkan laba fiskal atau PKP. Selanjutnya Koreksi fiskal ini dapat berupa:

1) Perbedaan permanen / Tetap

Perbedaan permanen merupakan perbedaan pengakuan suatu penghasilan atau biaya berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan dengan prinsip akuntansi yang sifatnya permanen atau tetap. Artinya, perbedaan ini tidak akan

hilang sejalan dengan waktu. Selain itu, perbedaan pengakuan pajak ini timbul karena terjadi transaksi-transaksi pendapatan dan biaya yang diakui menurut akuntansi komersial dan tidak diakui menurut fiskal (pajak).

Dimana pengakuan seperti hal tersebut biasanya terdapat pada kategori dibawa ini, yaitu:

- a. Menurut akuntansi komersial yakni penghasilan sedangkan menurut ketentuan PPh bukan penghasilan. Misalnya dividen yang diterima oleh Perseroan Terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri dari penyertaan modal sebesar 25% atau lebih pada badan usaha yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia. (Pasal 4 ayat 3 UU PPh).
- b. Menurut akuntansi komersial yakni penghasilan, sedangkan menurut ketentuan PPh telah dikenakan PPh yang bersifat final. Penghasilan ini dikenakan pajak tersendiri (*final*) sehingga dipisahkan (tidak perlu digabung) dengan penghasilan lainnya dalam menghitung PPh yang terutang. Diantaranya:
 - Penghasilan dari transaksi penjualan saham di bursa efek.
 - Penghasilan dari hadiah undian.
 - Penghasilan bunga tabungan, deposito, jasa giro dan diskonto BI.
 - Penghasilan bunga/diskonto obligasi yang dijual di bursa efek.
 - Penghasilan atas persewaan tanah dan bangunan.
 - Penghasilan dari jasa konstruksi (Pengusaha Konstruksi Kecil).
 - Penghasilan WP perusahaan pelayaran dalam negeri.
- c. Menurut akuntansi komersial yakni beban (biaya) sedangkan menurut ketentuan PPh tidak dapat dibebankan (Pasal 9 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008), misalnya biaya-biaya yang menurut ketentuan PPh tidak dapat dibebankan karena tidak memenuhi syarat-syarat tertentu. Misalnya: daftar nominatif biaya entertainment, daftar nominatif atas penghapusan piutang), pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.

Perbedaan permanen disebabkan karena adanya penghasilan yang bukan merupakan objek pajak atau penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final (PPh final), dan adanya *non-deductible expenses*, misalnya penghasilan bunga deposito. Laporan keuangan komersial melaporkannya sebagai penghasilan lain-lain, sedangkan laporan keuangan fiskal tidak memasukkannya dalam perhitungan laba fiskal karena telah dikenakan PPh Final. Selain itu terdapat beberapa jenis beban yang tidak boleh menjadi pengurang oleh Undang-Undang Perpajakan. Sebagai contoh yaitu biaya sumbangan. Dimana, dalam laporan keuangan komersial, biaya sumbangan diakui sebagai pengurang untuk menghitung laba komersial (laba akuntansi). Sedangkan, laporan keuangan fiskal tidak mengakui biaya sumbangan kecuali memenuhi ketentuan sesuai

dengan Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan Undang- Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

2) Perbedaan temporer (waktu) / Sementara

Perbedaan temporer yakni perbedaan yang terjadi secara fiskal karena perbedaan pengakuan waktu dan biaya dalam menghitung laba. Perbedaan temporer juga terjadi karena perbedaan pengakuan pembebanan dalam periode yang berbeda, namun kejadian-kejadian tersebut tetap diakui baik dalam laporan keuangan maupun dalam laporan fiskal tetapi dalam periode yang berbeda. Perbedaan temporer ini merupakan perbedaan dasar pengenaan pajak (DPP) dari suatu aktiva atau kewajiban, yang menyebabkan laba fiskal bertambah atau berkurang pada periode yang akan datang. Perbedaan temporer disebabkan oleh perbedaan persyaratan waktu item pendapatan dan biaya. Perbedaan sementara setelah beberapa waktu dampaknya akan sama terhadap laba akuntansi maupun laba fiskal.

Adapun unsur-unsur yang menjadi objek dalam beda temporer ini yaitu:

- a) Metode Penyusutan dan atau Amortisasi
- b) Metode penilaian persediaan
- c) Penyisihan piutang tak tertagih
- d) Rugi-laba selisih kurs
- e) Kompensasi Kerugian
- f) Penyisihan bonus

2.4. Pengertian Laba

2.4.1. Menurut Akuntansi

Laba atau keuntungan dapat didefinisikan dengan dua cara. yang pertama Laba dalam ilmu ekonomi murni didefinisikan sebagai peningkatan kekayaan seorang investor sebagai hasil penanam modalnya, setelah dikurangi biaya-biaya yang berhubungan dengan penanaman modal tersebut (termasuk di dalamnya, biaya kesempatan). Sementara itu, laba dalam akuntansi didefinisikan sebagai selisih antara harga penjualan dengan biaya produksi. Perbedaan di antara keduanya adalah dalam hal pendefinisian biaya

Menurut Sofyan Syafri Harahap (2015, 308) dalam akuntansi yang memiliki konsep perhitungan laba juga dikenal perbedaan pandangan dalam menghitung laba (*Income*). Ada empat pendapat, yaitu:

- 1) Pemikiran klasik yang berpedoman pada postulat *unit of measure* dan prinsip *Historical Cost Accounting* atau *Conventional Accounting* sebagaimana yang kita anut saat ini, yang dinamakan konsep laba *Accounting Income*;
- 2) Pemikiran neo klasik yang mengubah postulat *unit of measure* dengan menerapkan perhitungan perubahan tingkat harga umum (*General Price Level*) dan tetap mempertahankan prinsip *Historical Cost*, yang dikenal dengan istilah

- General Price Level Adjusted Historical Cost Accounting (GPLA Historical Accounting)*, dan perhitungan labanya disebut *GPLA Accounting Income*;
- 3) Pemikiran radikal; yang memilih harga sekarang (*current value*) sebagai dasar penilaian bukan *Historical Cost* lagi, dimana konsep ini dikenal dengan *Current Value Accounting*, sedangkan perhitungan labanya disebut *Current Income*;
 - 4) Pemikiran neo radikal yang menggunakan *Current Value*, tetapi disesuaikan dengan perubahan tingkat harga umum, yang disebut *GPLA Current Value Accounting*, sedangkan perhitungan labanya disebut *Adjusted Current Income*.

Menurut akuntansi yang dimaksud dengan laba akuntansi adalah perbedaan antara *revenue* yang direalisasi yang timbul dari transaksi pada periode tertentu dihadapkan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan pada periode tersebut

Umumnya perusahaan didirikan untuk mencapai tujuan tertentu yaitu memperoleh laba yang optimal dengan pengorbanan yang minimal untuk mencapai hal tertentu perlu adanya perencanaan dan pengendalian dalam setiap aktivitas usahanya agar perusahaan dapat membiayai seluruh kegiatan yang berlangsung secara terus menerus.

Laba akuntansi menurut pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 46 didefinisikan sebagai laba rugi selama satu periode sebelum dikurangi beban pajak. Laba merupakan hasil dari penghasilan (*income*) yang telah dikurangi dengan beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa terjadi, misalnya HPP, gaji, dan penyusutan. Dimana definisi penghasilan disini dapat berupa pendapatan maupun keuntungan.

Menurut Soemarso S.R (2015, 227) Laba merupakan selisih antara laba bruto dan beban usaha disebut laba usaha (*income from operation*) atau laba operasi (*operating income*). Laba adalah laba yang diperoleh semata mata dari kegiatan utama perusahaan.

Analisis laba merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting bagi manajemen guna mengambil keputusan untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. Artinya analisis laba akan memberi manfaat dan akan banyak membantu manajemen dalam melakukan tindakan apa yang akan diambil ke depan dengan kondisi yang terjadi sekarang atau untuk mengevaluasi apa penyebab turun atau naiknya laba tersebut sehingga target tidak tercapai. Dengan demikian, analisis laba memberikan manfaat yang cukup banyak bagi pihak manajemen. Adapun menurut Kasmir (2011, 303) dalam Herdawati (2015) menyatakan bahwa ada dua jenis laba yakni :

- a. Laba Kotor (*Gross Profit*) artinya laba yang diperoleh sebelum dikurangi biaya-biaya yang menjadi beban perusahaan. Artinya laba keseluruhan yang pertama sekali perusahaan peroleh.
- b. Laba bersih (*Net Profit*) merupakan laba yang telah dikurangi biaya-biaya yang merupakan beban perusahaan dalam suatu periode tertentu termasuk pajak.

2.5. Manajemen Laba

2.5.1. Pengertian Manajemen Laba

Hingga saat ini belum ada kesepakatan mengenai definisi manajemen laba. Sebagian pihak menganggap manajemen laba sebagai perbuatan curang, namun sebagian lagi berpendapat manajemen laba bukan suatu kecurangan melainkan suatu aktivitas yang lumrah dilakukan selama masih berada dalam ruang lingkup prinsip akuntansi. Perbedaan ini terjadi karena adanya perbedaan sudut pandang mengenai upaya manajemen laba tersebut.

Manajemen laba dapat dicitakan sebagai sebuah trik akuntansi di mana fleksibilitas dalam penyusunan laporan keuangan digunakan atau dimanfaatkan oleh manajer yang berusaha untuk memenuhi target laba. Manajemen laba terjadi apabila manajer menggunakan kreativitasnya dalam penyusunan laporan keuangan dan mengukur transaksi untuk merubah laporan keuangan, dengan tujuan memberi kesan tertentu dan memengaruhi tindakan para *stakeholders* yang bergantung pada laporan keuangan tersebut. (Hery, 2015, 59)

Menurut Ilham Fahmi (2013, 279) dalam Dwi Perwira Sianturi (2016) manajemen laba didefinisikan sebagai berikut :

Earnings management (manajemen laba) adalah suatu tindakan yang mengatur laba sesuai dengan yang dikehendaki oleh pihak tertentu atau terutama oleh manajemen perusahaan (*company management*). Tindakan *earnings management* sebenarnya didasarkan oleh berbagai tujuan dan maksud-maksud yang terkandung didalamnya.

Menurut Earl K. Stice dkk yang telah diterjemahkan sebelumnya oleh Ali Akbar (2009, 120) manajemen laba dapat didefinisikan sebagai intervensi manajemen dengan sengaja dalam proses penentuan laba, biasanya untuk memenuhi tujuan pribadi (Schipper, 1989). Seringkali proses ini mencakup mempercantik laporan keuangan, terutama angka yang paling bawah, yaitu laba.

Dari beberapa pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen laba merupakan suatu tindakan memanipulasi (mendandani atau merekayasa) angka akuntansi (dalam hal ini laporan keuangan) baik dengan cara menaikkan-turunkan laba yang dilakukan oleh manajemen untuk menciptakan kinerja perusahaan terkesan lebih baik demi mencapai keuntungan pribadinya. Selain itu manajemen laba merupakan aktivitas manajerial untuk mempengaruhi dan mengintervensi laporan keuangan (Sulistyanto, 2008). Sedangkan menurut (Annisa Meta) Manajemen laba adalah tindakan yang dilakukan oleh pihak manajemen dengan menaikkan atau menurunkan laba yang dilaporkan dari unit yang menjadi tanggung jawabnya yang tidak mempunyai hubungan dengan kenaikan atau penurunan profitabilitas dalam jangka panjang. Alasan tindakan manajemen laba biasanya diterapkan untuk meningkatkan kepercayaan pemegang saham terhadap manajer. Manajemen laba berkaitan erat dengan perolehan laba atau prestasi usaha dalam suatu perusahaan,

karena seorang manajer dianggap berhasil jika tingkat perolehan laba yang diperoleh berhasil, dan biasanya manajer akan diberikan bonus-bonus akal hal tersebut. Sampai saat ini, manajemen laba merupakan area yang kontroversial dan penting dalam akuntansi keuangan. Manajemen laba tidak selalu diartikan sebagai suatu upaya negatif yang merugikan karena tidak selamanya manajemen laba berorientasi pada manipulasi laba. Manajemen laba tidak selalu dikaitkan dengan upaya untuk memanipulasi data atau informasi akuntansi, tetapi lebih condong dikaitkan dengan pemilihan metode akuntansi yang secara sengaja dipilih oleh manajemen untuk tujuan tertentu dalam batasan GAAP.

Ada dua perspektif yang menyebabkan dilakukannya manajemen laba antara lain yaitu perspektif informasi dan perspektif oportunistis, Sulistyanto (2008, 10-25) menjelaskan berikut :

1) Perspektif Informasi

Perspektif Informasi merupakan pandangan yang menyatakan bahwa manajemen laba merupakan kebijakan manajerial untuk mengungkapkan harapan pribadi manajer tentang arus kas perusahaan di masa depan. Upaya tersebut dilakukan dengan memanfaatkan kebebasan untuk memilih, menggunakan dan mengubah metode dan prosedur akuntansi yang ada. Misalnya, penggunaan metode FIFO dan *average* dalam menentukan harga pokok. Penggunaan metode yang berbeda akan menghasilkan nilai yang berbeda pula. Seseorang dapat mengatur nilai perusahaan dengan memanfaatkan kebebasan untuk memilih dan mengubah metode tersebut.

2) Perspektif Oportunistis

Perspektif Oportunistis merupakan pandangan yang menyatakan bahwa manajemen laba merupakan perilaku oportunistis manajer untuk mengetahui investor dan memaksimalkan kesejahteraannya karena menguasai informasi lebih banyak dibandingkan pihak lain sehingga terjadinya kesenjangan informasi. Kesenjangan informasi inilah yang mendorong manajer untuk berperilaku oportunistis dalam mengungkapkan informasi-informasi yang mengenai perusahaan. Semakin besar asimetri informasi semakin besar dorongan bagi manajer untuk berperilaku oportunistis. Hal ini yang mengakibatkan seorang manajer hanya akan mengungkapkan suatu informasi tertentu jika ada manfaat yang diperolehnya. Sedangkan apabila tidak ada manfaat yang bisa diperoleh maka manajer akan menyembunyikan atau menunda pengungkapan informasi itu. Bahkan manajer akan mengubah atau memalsukan informasi jika ada manfaatnya yang bisa diperolehnya.

2.5.2. Motivasi Manajemen Laba

Banyak alasan melakukan manajemen laba. Antara lain seperti yang dijelaskan oleh Sulistyanto (2008, 62-101) yaitu:

1) Motivasi Pasar Modal

Perkembangan dunia usaha yang semakin maju menyebabkan perubahan orientasi perusahaan dalam mencari dana operasional atau investasi dari pasar modal dibandingkan dari perbankan atau lembaga keuangan. Ada beberapa alasan yang mendasari hal tersebut, yaitu: bunga utang yang harus dibayar ke kreditur cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan dividen yang akan dibagikan ke investor. Selain itu bunga pinjaman akan menjadi beban periodik yang akan ditanggung perusahaan meskipun perusahaan sedang dalam kesulitan keuangan. Hal ini berbeda dengan dividen yang hanya dibagikan sesuai dengan kebijakan manajemen.

Sementara itu di sisi lain publik juga mulai mengalami perubahan orientasi dalam menyimpan dananya dipasar modal dengan beberapa alasan yang mendasar, yaitu semakin rendahnya bunga tabungan dibandingkan dividen yang diterima dari perusahaan tempat investasi. Selain upaya menginvestasikan dana dipasar modal berarti seseorang telah menjadi salah seorang pemilik perusahaan bersangkutan. Bahkan apabila hak kepemilikannya mayoritas, maka seseorang akan mempunyai suara yang cukup signifikan dalam menentukan, memilih manajer, dan mempengaruhi kebijakan-kebijakan perusahaan.

Meskipun perusahaan dikuasai oleh seseorang pemegang saham mayoritas akan tetapi perusahaan harus tetap dikelola oleh pihak lain. Hal ini sesuai dengan konsep teori agensi yang memisahkan kepentingan *principal* dengan *agen* (manajer). Sehingga hal ini sering kali menyebabkan seorang manajer yang diimpahkan wewenang untuk mengelola perusahaan menjadi cenderung berperilaku oportunitis yaitu mendahulukan kepentingannya di atas kepentingan pihak lain. Laporan keuangan yang seharusnya menginformasikan nilai dan kondisi fundamental perusahaan digunakan untuk kepentingan pribadi. Hal ini dilakukan dengan menyembunyikan, menunda pengungkapan, atau mengubah informasi fundamental menjadi informasi palsu pada saat perusahaan akan melakukan suatu transaksi tertentu.

2) Penawaran Saham Perdana

Ada beberapa alasan yang memberi mengapa perusahaan *private* (perusahaan yang kepemilikannya dikuasai seseorang, keluarga atau sekelompok, keluarga atau sekelompok tertentu) tertarik untuk melakukan saham perdana, yaitu perusahaan akan memperoleh dana tambahan dan membagi-bagikan resiko perusahaan. Untuk menarik minat para calon investor ketika penawaran saham perdana, manajemen perusahaan cenderung mempercantik laporan keuangan dengan berpola menaikkan labanya (*income maximization*). Hal ini dilakukan tidak hanya pada periode penawaran saham perdana tetapi juga dilakukan pada

beberapa periode sebelum dan setelah penawaran saham perdana. Semua upaya tersebut dilakukan agar meningkatkan harga saham perusahaan. Selain itu perusahaan juga melakukan manajemen laba karena motivasi penawaran saham tambahan serta transaksi dan peristiwa lain seperti *management buyouts* (upaya membeli kembali saham perusahaan yang sudah beredar dengan pola menurunkan laba (*income minimization*) perusahaan pada periode ketika akan melakukan *management buyouts*).

3) Motivasi Kontraktual

Motivasi Kontraktual muncul; karena adanya perjanjian manajer dengan pihak lain yang berbasis pada kompensasi manajerial (*manajerial compensation*) dan perjanjian ulang (*debt covenant*).

Motivasi bonus merupakan dorongan bagi manajer dalam melaporkan laba yang diperolehnya untuk memperoleh bonus yang dihitung atas dasar laba. Jika laba rendah daripada target yang ditetapkan maka mendorong manajemen untuk melakukan manipulasi dengan mentransfer laba masa depan menjadi laba sekarang dengan harapan akan memperoleh bonus.

Pelanggaran perjanjian hutang (*debt covenant violations*) membuktikan adanya penggunaan akrual dengan menaikkan laba dalam laporan keuangan tahunan perusahaan yang melanggar perjanjian itu. Perjanjian hutang terbukti mempunyai pengaruh terhadap pilihan akuntansi pada tahun pelaporan dan tahun terjadinya pelanggaran itu. Perusahaan yang dinyatakan melanggar perjanjian utang secara signifikan akan menaikkan laba sehingga rasio *debt-to-equity* dan *interest coverage* pada level yang ditentukan.

4) Motivasi Regulasi

Dalam hubungan agensi ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dan dapat diterima antara kedua belah pihak. Dalam konteks hubungan agensi antara pemerintah dengan perusahaan ini maka perusahaan mempunyai kewajiban untuk membayar sejumlah pajak yang ditentukan dengan menggunakan laba sebagai dasar pengenaan pajaknya. Sedangkan pemerintah mempunyai hak untuk menerima pajak tersebut.

Akan tetapi manajer sering kali melakukan upaya-upaya agar kewajiban membayar pajaknya menjadi seminimal mungkin. Upaya ini dilakukan dengan memanfaatkan setiap kesempatan yang ada untuk meminimalisir pajak. Seperti misalnya dengan memanfaatkan kebijakan penentuan estimasi cadangan kerugian piutang maupun biaya amortisasi dan depresiasi aktiva, serta dapat memanfaatkan perubahan peraturan perpajakan. Misalnya dengan memanfaatkan perubahan tarif pajak guna meminimalisir pajak yang harus dibayar.

2.5.3. Pandangan Manajemen Laba

Sulistiyanto (2008, 104-110) menjabarkan mengenai pandangan terhadap manajemen laba yaitu sebagai berikut:

- 1) Manajemen laba sebagai kecurangan
 - a. Mencatat penjualan sebelum dapat direalisasi
Aktivitas rekayasa ini dilakukan dengan mencatat penjualan sebelum direalisasi. Aktivitas ini bertentangan dengan prinsip konservatisme akuntansi yang menyatakan bahwa satu transaksi atau peristiwa diakui dan dicatat sebagai pendapatan apabila perusahaan dapat memastikan bahwa pendapatan itu kemungkinan besar dapat terealisasi di masa depan. Sementara transaksi atau peristiwa yang belum dapat dipastikan apakah akan dapat terealisasi di masa depan tidak diizinkan untuk diakui dan dicatat dalam laporan keuangan yang disusunnya.
 - b. Mencatat penjualan fiktif
Aktivitas rekayasa ini dilakukan dengan mencatat penjualan fiktif. Artinya perusahaan memalsukan transaksi penjualan yang sebenarnya belum atau tidak pernah dilakukannya. Upaya semacam ini dilakukan perusahaan dengan mengakui dan mencatat barang konsinyasi atau barang yang baru dikirim kepada pembeli sebagai barang yang telah terjual. Lebih parah lagi adalah dengan mengakui dan mencatat transaksi-transaksi yang sebenarnya tidak pernah ada atau tidak pernah dilakukan sama sekali.
 - c. Mengundurkannya tanggal bukti pembelian
Aktivitas rekayasa ini dilakukan dengan mengundurkannya tanggal bukti pembelian. Hal ini dilakukan untuk mengatur tingkat laba sesuai yang diinginkan manajer perusahaan. Apabila pada satu periode kinerja perusahaan lebih rendah dari kinerja yang ditargetkannya maka perusahaan akan menunda pengakuan biaya yang akan dikeluarkan untuk melakukan pembelian itu. Hal ini dilakukan agar kinerja perusahaan kelihatan bagus dari periode ke periode meskipun sebenarnya dalam periode tertentu perusahaan mengeluarkan biaya cukup tinggi.
 - d. Mencatat persediaan fiktif
Aktivitas rekayasa ini dilakukan dengan mencatat persediaan fiktif. Hal ini dilakukan agar nilai aktiva perusahaan menjadi lebih besar daripada nilai sesungguhnya. Upaya ini dilakukan agar perusahaan kelihatan mempunyai aktiva lebih besar dibandingkan aktiva yang sesungguhnya dimiliki sehingga akan meningkatkan kinerja solvabilitas perusahaan bersangkutan.
- 2) Manajemen laba bukan kecurangan
Manajemen laba tidak dikatakan sebagai perbuatan curang ketika proses pencatatan transaksi atau peristiwa dilakukan sesuai dengan kerangka prinsip-prinsip akuntansi umum. Akuntansi memberikan kesempatan perusahaan untuk secara konservatif dan agresif mengakui dan mencatat suatu transaksi atau peristiwa yang dilakukan dan dialaminya.

a. Akuntansi konservatif

Akuntansi konservatif adalah proses akuntansi untuk mengakui dan mencatat suatu transaksi atau peristiwa secara berhati-hati sehingga perusahaan tidak akan mengalami kesulitan di masa depan. Misalnya, mempercepat pengakuan provisi dan cadangan.

b. Akuntansi agresif

Akuntansi agresif adalah proses akuntansi untuk mengakui dan mencatat suatu transaksi atau peristiwa secara eksplorasi. Sebagai contoh adalah mengecilkan catatan provisi piutang tidak tertagih dan menarik ke bawah provisi atau cadangan.

Secara konseptual kedua model akuntansi dapat membuat informasi laba dalam laporan keuangan menjadi lebih kecil atau lebih besar daripada laba yang sesungguhnya. Alasan inilah yang menjadi dasar pendapat yang menyatakan bahwa manajemen laba bukanlah tindakan rekayasa yang mengarah kecurangan.

2.5.4 Pola Manajemen Laba

Berikut ini adalah pola manajemen laba yang biasa dilakukan oleh manajemen perusahaan, menurut Scoot (2003) dalam Rakhmawati (2011) yaitu:

- 1) *Taking a bath*: manajer mencoba mengalihkan *expected future cost* ke masa kini agar memiliki peluang yang lebih besar mendapatkan laba di masa mendatang. Biasanya dilakukan bila perusahaan mengadakan restrukturisasi atau reorganisasi.
- 2) *Income minimization*: manajer mencoba memindahkan beban ke masa kini agar memiliki peluang yang lebih besar untuk mendapatkan laba di masa mendatang.
- 3) *Income maximization*: manajer mencoba meningkatkan laba masa kini dengan memindahkan beban ke masa mendatang. Biasanya dilakukan manajer ketika ingin memperoleh bonus tahunan.
- 4) *Income smoothing*: tindakan di mana manajer memperhalus fluktuasi lebih dari periode ke periode dengan cara memindahkan laba dari periode yang memiliki laba tinggi ke periode yang memiliki laba rendah.

Dalam melakukan manajemen laba ada tiga target utama permainan manajerial (Sulistyanto, 2008, 37-43), antara lain:

- 1) Meninjau kembali dan mengubah berbagai estimasi akuntansi: misalnya, umur ekonomis aktiva tetap (*tangible asset*) dan aktiva tidak berwujud (*intangible asset*), persentase biaya kerugian piutang, dan lain-lain.
- 2) Perubahan estimasi memang diperbolehkan menurut akuntansi umum, namun setiap perubahan harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.
- 3) Mengubah dan mengganti metode akuntansi: manajer mempunyai kebebasan untuk mengubah atau mengganti metode akuntansi yang selama dipakai dengan metode lainnya asalkan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

Upaya ini tidak mudah diketahui oleh orang yang tidak benar-benar memahami laporan keuangan secara integral dan komprehensif.

- 4) Permasalahan cadangan: cadangan merupakan laba yang ditarik kenbelakang dari periode pengakuan sesungguhnya dan menggunakan pada saat dibutuhkan. Contohnya cadangan kerugian piutang dan penurunan nilai persediaan. Hal ini dilakukan laba yang dilaporkan perusahaan tidak terlalu tinggi. Sebaliknya pada saat menginginkan labanya lebih tinggi maka perusahaan dapat menggunakan cadangan tersebut untuk mengatur labanya sesuai keinginan.

2.5.5. Pengukuran Manajemen laba

Praktik manajemen laba di dalam perusahaan merupakan hal yang logis di mana jika fleksibilitas akuntansi memungkinkan manajer dalam mempengaruhi pelaporan. Dalam melakukan penelitian untuk mengungkapkan praktisi manajemen laba tersebut ada berbagai proksi yang digunakan untuk mengevaluasi manajemen laba dalam berbagai proksi yang digunakan untuk mengevaluasi manajemen laba dalam berbagai upaya yang digunakan manajer dalam melakukan manajemen laba. Menurut Sulistyanto (2008) manajemen laba biasanya diteliti dengan cara pembentukan hipotesa oleh peneliti kemudian manajemen laba kemungkinan bisa muncul dan menguji kemungkinan tersebut dengan penggunaan metode yang tepat. Secara umum ada tiga pendekatan untuk mendeteksi manajemen laba yakni:

- 1) Model berbasis *aggregate accrual*, yakni model yang digunakan untuk mendeteksi aktivitas rekayasa ini dengan menggunakan *discretionary accruals* sebagai proksi manajemen laba. Model ini dikembangkan oleh Healy (1985), DeAngelo (1986), Jones (1991), Dechow, Sloan dan Sweeney (1995).
- 2) Model yang berbasis *specific accruals*, yakni pendekatan yang menghitung akrual sebagai proksi manajemen laba dengan menggunakan item laporan keuangan tertentu dari industri tertentu pula, contohnya cadangan kerugian piutang dari industri asuransi. Model ini pertama kali dikembangkan oleh McNichols dan Wilson (1988).
- 3) Model berbasis *distribution of earnings after management*, yakni pendekatan dengan melakukan pengujian secara statistik terhadap komponen-komponen laba untuk mendeteksi faktor-faktor yang mempengaruhi pergerakan laba. Model ini pertama kali dikembangkan oleh Burgtahler dan Dichev (1997).

Akan tetapi dari ketiga model diatas hanya model berbasis *aggregate accrual* yang dinilai sebagai model yang memberikan hasil paling kuat dalam mendeteksi manajemen laba. Alasannya karena model empiris ini sejalan dengan akuntansi berbasis akrual yang digunakan oleh dunia usaha dan model empiris ini menggunakan semua komponen laporan keuangan dalam mendeteksi rekayasa keuangan. Adapun beberapa model empiris berbasis *aggregate accrual* untuk mendeteksi manajemen laba yakni :

- 1) Model Healy (1985), yakni mendeteksi manajemen laba dengan menghitung nilai total akrual dengan cara mengurangi laba akuntansi yang diperoleh selama satu periode tertentu dengan arus kas operasi periode yang bersangkutan. Perhitungan *nondiscretionary accruals model* Healy dengan membagi rata-rata total akrual dengan total aktiva periode sebelumnya. Ada kelemahan mendasar dalam model Healy yang diindikasikan oleh Dechow dkk (1995) yaitu bahwa total akrual yang digunakan sebagai proksi manajemen laba mengandung *nondiscretionary accruals*. Padahal *nondiscretionary accruals* merupakan komponen total akrual yang tidak bisa dikelola atau diatur oleh manajer seperti halnya komponen *discretionary accruals*.
- 2) Model DeAngelo (1986), yakni mengukur manajemen laba dengan *nondiscretionary accrual*, yaitu dengan menghitung total akrual akhir periode yang diskala dengan total aktiva periode sebelumnya. Seandainya *nondiscretionary accrual* selalu konstan setiap saat dan *discretionary accruals* mempunyai rata-rata sama dengan nol selama periode estimasi, maka kedua model ini akan mengukur *discretionary accrual* tanpa kesalahan. Akan tetapi, apabila *nondiscretionary accrual* berubah dari periode ke periode, maka kedua model ini akan mengukur *discretionary accrual* dengan kesalahan.
- 3) Model Jones (1991), yakni dalam model ini tidak lagi menggunakan asumsi bahwa *nondiscretionary accrual* adalah konstan. Namun, model ini menggunakan dua asumsi sebagai dasar pengembangan yaitu akrual periode berjalan (*current accruals*) dan *gross property, plant, and equipment*. Secara implisit model Jones mengasumsikan bahwa pendapatan merupakan *nondiscretionary*. Apabila laba dikelola dengan menggunakan pendapatan *discretionary accrual*, maka model ini akan menghapus bagian laba yang dikelola untuk proksi *discretionary accrual*.
- 4) Model Jones Dimodifikasi (Dechow, Sloan dan Sweeney, 1995), yakni modifikasi dari model Jones yang didesain untuk mengeliminasi kecenderungan untuk menggunakan perkiraan yang bisa salah dari model Jones untuk menentukan *discretionary accruals* ketika *discretion* melebihi pendapatan. Sama halnya dengan model manajemen laba berbasis *aggregate accrual* yang lain, model ini menggunakan *discretionary accrual* sebagai proksi manajemen laba. Kelebihannya, model ini memecah total akrual menjadi empat komponen utama akrual, yaitu *discretionary current accrual*, *discretionary long term accrual*, dan *nondiscretionary long term accruals*. *Discretionary current accrual* dan *nondiscretionary current accrual* merupakan akrual yang berasal dari aktiva lancar. Sedangkan *discretionary long term accrual* dan *nondiscretionary long term accruals* merupakan akrual dari aktiva tidak lancar.

2.6. Penelitian Sebelumnya

Sebagai acuan dari penelitian ini dikemukakan hasil-hasil penelitian yang dilaksanakan sebelumnya yaitu :

Tabel 5
Penelitian Sebelumnya

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Analisis Data	Hasil Penelitian (Kesimpulan)
1.	Herdawati (2015)	Analisis Pengaruh Perencanaan Pajak dan Beban Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba (studi empiris pada perusahaan manufaktur yang tercatat di bursa efek Indonesia pada tahun 2012-2014)	Menggunakan statistik deskriptif dan metode regresi logistik	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh perencanaan pajak dan beban pajak tangguhan terhadap manajemen laba. Objek penelitian ini yaitu perusahaan manufaktur yang tercatat di bursa efek Indonesia (BEI) dengan periode pengamatan tahun 2012 sampai tahun 2014. Metode pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dan metode analisis data menggunakan regresi logistik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan pajak memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap manajemen laba, dan beban pajak tangguhan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap manajemen laba. Artinya peningkatan perencanaan pajak dan beban pajak tangguhan mempengaruhi peningkatan peluang serta probabilitas perusahaan dalam melakukan manajemen laba.

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Analisis Data	Hasil Penelitian (Kesimpulan)
2.	Yana Ulfah (2013)	Pengaruh Beban Pajak Tanggungan dan Perencanaan Pajak terhadap Praktek Manajemen Laba pada Perusahaan Manufaktur Tahun 2009-2011.	Statistik Deskriptif dan Regresi Linier Berganda	Berdasarkan hasil penelitian analisis regresi diperoleh nilai koefisien regresi variable beban pajak tanggungan berpengaruh positif artinya setiap kenaikan beban pajak tanggungan, maka probabilitas perusahaan melakukan manajemen laba akan mengalami peningkatan, maka probabilitas perusahaan melakukan manajemen laba akan mengalami peningkatan. Begitupun Perencanaan pajak memiliki pengaruh positif, semakin tinggi perencanaan pajak maka semakin besar peluang perusahaan melakukan manajemen laba.

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Analisis Data	Hasil Penelitian (Kesimpulan)
3.	Ferry Aditama dan Anna Purwaningsih (2014)	Pengaruh Perencanaan Pajak terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Non Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2009-2012.	Statistik Deskriptif dan Regresi Linier Sederhana	Berdasarkan hasil analisis regresi linier sederhana, terlihat bahwa variabel perencanaan pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel manajemen laba pada perusahaan nonmanufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitian yang telah dilakukan, dengan data yang terdistribusi secara normal, hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan nonmanufaktur yang menjadi sampel dalam penelitian ini melakukan manajemen laba dengan menghindari penurunan laba. Sedangkan hasil uji regresi yang telah dilakukan penulis, perencanaan pajak ternyata tidak berpengaruh secara signifikan pada perusahaan nonmanufaktur yang ada di Bursa Efek Indonesia, yaitu tingkat signifikansi atau p value lebih besar dari $\alpha=5\%$, sehingga H_a penelitian ini ditolak.

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Analisis Data	Hasil Penelitian (Kesimpulan)
4	Riyan Rizki Perdana (2014)	Pengaruh Beban Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba (Study Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2012)	Statistik Analisis Kuantitatif	<p>Bahwa berdasarkan hasil uji empiris pengaruh beban pajak tangguhan terhadap manajemen laba dengan metode analisis regresi binary logistik pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2010-2012, dapat disimpulkan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Total pendapatan tangguhan cenderung menurun dari tahun 2010-2012. b. Beban pajak tangguhan mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba untuk menghindari penurunan laba. Hal ini dibuktikan berdasarkan hasil uji regresi logistik pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada periode 2010-2012. <p>Berdasarkan hasil uji statistik pada penelitian ini dapat dilihat nilai R pada model summary sebesar 0,063. Hal ini menunjukkan bahwa variabel dependen (manajemen laba) dapat dijelaskan oleh variabel independen (bebas pajak tangguhan) sebesar 6,3% sedangkan sisanya yaitu 93,7% .</p>

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Analisis Data	Hasil Penelitian (Kesimpulan)
5	Dwi Perwira Sianturi (2016)	Pengaruh Beban Pajak Tangguhan dan Perencanaan Pajak terhadap Manajemen Laba (Studi Pada Perusahaan Non Manufaktur Subsektor Pertambangan Batu Bara yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia)	Metode Deskriptif	<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari pengaruh beban pajak tangguhan dan perencanaan pajak terhadap manajemen laba pada perusahaan non manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2011-2014. Metode yang pada penelitian ini adalah metode deskriptif. Teknik pengumpulan menggunakan data sekunder yang diambil pada situs resmi Bursa Efek Indonesia. Analisis statistik yang digunakan adalah uji asumsi klasik, analisis regresi, analisis korelasi, pengujian hipotesis dengan menggunakan uji t serta analisis koefisien determinasi. Penelitian ini menggunakan 6 perusahaan non manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2011-2014. Hasil penelitian bahwa Beban Pajak Tangguhan memberikan pengaruh sebesar 26,6% terhadap Manajemen Laba, Perencanaan Pajak memberikan pengaruh sebesar 26,5% terhadap Manajemen Laba.</p>

2.7. Kerangka Pemikiran

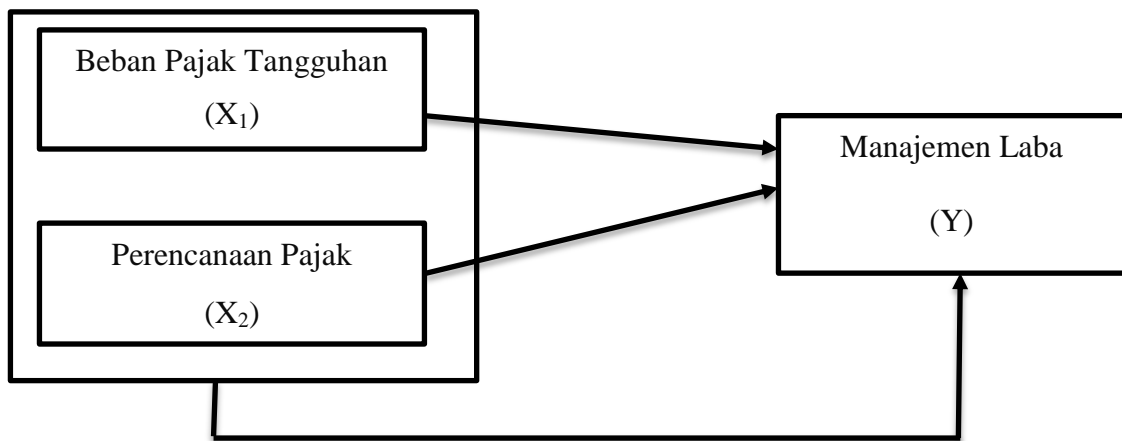
Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan sering direkayasa oleh pihak manajemen untuk mengoptimalkan keuntungan perusahaan dan juga untuk kepentingan dirinya sendiri atau dikenal dengan manajemen laba. Terdapat beberapa metode yang digunakan untuk menguji manajemen laba dan biasanya manajemen laba sering sekali dikaitkan dengan perencanaan pajak dan beban pajak tangguhan. Perusahaan melakukan perencanaan pajak seefektif mungkin, bukan hanya untuk memperoleh keuntungan dari segi fiskal saja, tetapi sebenarnya perusahaan juga memperoleh keuntungan dalam memperoleh tambahan modal dari pihak investor melalui penjualan saham perusahaan.

Manajemen laba merupakan tindakan manajemen untuk memilih kebijakan akuntansi dari suatu standar tertentu untuk mempengaruhi laba yang akan terjadi menjadi seperti yang mereka inginkan melalui pengelolaan faktor internal yang dimiliki atau digunakan perusahaan.

Menurut Healy dan Wahlen (1999) dalam Sulistyanto (2008, 49) mendefinisikan manajemen laba muncul ketika manajer menggunakan keputusan tertentu dalam pelaporan keuangan dan mengubah transaksi untuk mengubah laporan keuangan untuk mengelabui stakeholder yang ingin mengetahui kinerja ekonomi yang diperoleh perusahaan atau untuk mempengaruhi hasil kontak yang menggunakan angka-angka akuntansi yang dilaporkan itu.

Oleh karena itu, pajak yang merupakan unsur pengurang laba yang tersedia untuk dibagi kepada investor atau diinvestasikan oleh perusahaan, akan diusahakan oleh manajemen untuk diminimalkan guna mengoptimalkan jumlah dari laba bersih perusahaan. Dalam hal ini, terdapat suatu indikasi manajemen melakukan manajemen laba dalam proses perencanaan pajak. Begitupun dengan beban pajak tangguhan merupakan salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk mendeteksi adanya praktik manajemen laba yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. Plesko (2002) dalam Phillips et al. (2003) mengungkapkan bahwa semakin besar perbedaan antara laba fiskal dengan laba akuntansi menunjukkan semakin besarnya diskresi manajemen. Dengan demikian, semakin besarnya diskresi manajemen tersebut akan terefleksikan dalam beban pajak tangguhan dan mampu digunakan untuk mendeteksi praktik manajemen laba pada perusahaan. Serta semakin tingginya praktik manajemen laba, maka semakin tinggi pula kewajiban pajak tangguhan yang diakui oleh perusahaan sebagai beban pajak tangguhan (Phillips et al., 2003).

Penelitian ini menggunakan dua jenis variabel, yaitu variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen (variabel terikat) berupa manajemen laba. Sedangkan variabel independen (variabel bebas) yaitu perencanaan pajak dan beban pajak tangguhan yang dapat mempengaruhi manajemen laba.



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.7.1. Hubungan Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba

Hubungan antara perencanaan pajak dengan manajemen laba secara konseptual dapat dijelaskan dengan teori keagenan dan teori akuntansi positif. Dalam Teori keagenan ditekankan untuk mengatasi dua permasalahan yang dapat terjadi dalam hubungan keagenan (Einsenhart dalam Darmawati, dkk, 2004), yakni : (1) masalah keagenan yang timbul pada saat keinginan atau tujuan dari principal dan agent berlawanan dan merupakan hal yang sulit bagi principal untuk melakukan verifikasi tentang apa yang benar-benar dilakukan oleh agent; (2) masalah pembagian resiko yang timbul pada saat *principal* dan *agent* memiliki sikap yang berbeda terhadap resiko. Einsenhart (dalam Darmawati, dkk, 2004) menyatakan bahwa adanya asumsi yang mengenai sifat dasar manusia yakni : (1) manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self interest*), (2) manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi manusia mendatang (*bounded rationality*), dan (3) manusia selalu menghindari resiko (*risk averse*). Ketiga sifat tersebut menyebabkan informasi yang dihasilkan manusia untuk manusia lain selalu dipertanyakan reabilitasnya dan informasi yang disampaikan biasanya diterima tidak sesuai dengan kondisi perusahaan yang sebenarnya atau lebih dikenal sebagai informasi yang tidak simetris atau *assymerty information* (Ujiyantho & Pramuka, 2007), sehingga hal tersebut memberikan kesempatan kepada manajer untuk melakukan manajemen laba. Akibat terjadinya *assymetry information* antara manajemen (*agent*) dengan pemilik (*principal*), maka akan memberikan kesempatan kepada manajer untuk bertindak opportunistic, yaitu memperoleh keuntungan pribadi. Dalam hal pelaporan keuangan, manajer melakukan manajemen laba (*earnings management*) untuk menyesatkan pemilik (pemegang saham) mengenai kinerja ekonomi perusahaan. Semakin tingginya asimetri informasi antara manajer (*agent*) dengan pemilik (*principal*) yang mendorong pada tindakan manajemen laba oleh manajemen akan memicu semakin

tingginya biaya keagenan (*agency cost*) dan menunjukkan adanya hubungan positif antara asimetri informasi dengan manajemen laba (Ujiyantho & Pramuka, 2007).

Sedangkan menurut teori akuntansi positif Perilaku manajemen laba dapat dijelaskan melalui hipotesis ketiga yakni *The Political Cost Hypothesis* (Scott, 2003). Dikatakan bahwa perusahaan yang berhadapan dengan biaya politik, cenderung melakukan rekayasa penurunan laba dengan tujuan meminimalkan biaya politik yang harus mereka tanggung. Dalam biaya politik mencakup semua biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan terkait dengan regulasi pemerintah, salah satunya adalah beban pajak. Perusahaan akan melakukan perencanaan pajak seefektif mungkin, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dari segi fiskal dan juga untuk memperoleh keuntungan dalam memperoleh tambahan modal dari pihak investor melalui penjualan saham perusahaan. Status perusahaan yang sudah *go public* umumnya cenderung *high profile* daripada perusahaan yang belum *go public*. Sehingga untuk meningkatkan nilai saham perusahaan, maka manajemen termotivasi untuk memberikan informasi kinerja perusahaan yang sebaik mungkin. Oleh karena itu, pajak yang merupakan unsur pengurang laba yang tersedia untuk dibagi kepada investor atau diinvestasikan oleh perusahaan, akan diusahakan oleh manajemen untuk diminimalkan untuk mengoptimalkan jumlah dari laba bersih perusahaan.

2.7.2. Hubungan Beban Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba

Beban pajak tangguhan adalah salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk mendeteksi adanya praktik manajemen laba yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. Keberadaan pajak sebenarnya merupakan salah satu sumber penerimaan negara, selain itu akuntansi juga merupakan sistem pencatatan untuk menghasilkan laporan keuangan. Hanlon (2005) mengatakan bahwa secara spesifik sistem perpajakan dirancang untuk meningkatkan pendapatan negara, sebaliknya sistem akuntansi dirancang untuk menyediakan informasi tentang kinerja perusahaan dan diharapkan dapat mengatasi asimetris informasi (teori keagenan) yang mungkin terjadi antara manajemen sebagai pihak internal dan pengguna laporan keuangan sebagai pihak eksternal. Perbedaan yang timbul antara akuntansi pajak (laba fiskal) dan komersial dapat menyediakan informasi tambahan bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai kualitas *current earnings* (Philips, Pincus dan Rego, 2003). Alasannya karena peraturan perpajakan lebih membatasi keleluasaan penggunaan diskresi dalam menghitung penghasilan kena pajak, itulah sebabnya selisih laba komersial dan laba fiskal dapat menginformasikan tentang diskresi manajemen dalam proses akrual (Hanlon, 2005).

Semakin besar perbedaan antara laba fiskal dengan laba akuntansi menunjukkan semakin besarnya diskresi manajemen. Besarnya diskresi manajemen tersebut akan terefleksikan dalam beban pajak tangguhan dan mampu digunakan untuk mendeteksi praktik manajemen laba pada perusahaan (Plesko, 2002 dalam Phillips et al. (2003). Hal ini juga sejalan dengan yang diungkapkan Yulianti (2004)

yang menyatakan bahwa semakin besar persentase beban pajak tangguhan terhadap total beban pajak perusahaan menunjukkan pemakaian standar akuntansi yang semakin liberal. Semakin liberalnya standar akuntansi yang digunakan berarti semakin banyak asumsi dan *judgement* yang mengakibatkan besarnya laba secara akuntansi. Penggunaan asumsi dan *judgement* dapat merupakan suatu usaha manajemen laba oleh manajemen perusahaan. Perbedaan yang timbul antara akuntansi pajak dan komersial dapat menyediakan informasi tambahan bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai kualitas *current earnings* (Phillips, Pincus dan Rego, 2003). Alasannya, karena peraturan perpajakan lebih membatasi keleluasaan penggunaan diskresi dalam menghitung penghasilan kena pajak, itulah yang menyebabkan selisih laba komersial dan laba fiskal (*book-tax gap*) dapat menginformasikan tentang diskresi manajemen dalam proses akrual. Penjelasan lain yang dapat mendukung pernyataan bahwa beban pajak tangguhan dapat digunakan untuk mendeteksi praktik manajemen laba yaitu dengan cara melihat hasil koreksi fiskal berupa koreksi negatif. Koreksi negatif adalah kondisi di mana pendapatan menurut akuntansi fiskal lebih kecil daripada akuntansi komersial dan pengeluaran menurut akuntansi fiskal lebih besar daripada akuntansi komersial. Hal inilah yang menyebabkan terjadi kenaikan kewajiban pajak tangguhan pada pos neraca periode berjalan dan periode berikutnya diakui oleh perusahaan sebagai beban pajak tangguhan pada laporan laba rugi.

2.8. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan metode penelitian diatas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₁ : Perencanaan Pajak berpengaruh terhadap Manajemen Laba

H₂ : Beban Pajak Tangguhan berpengaruh terhadap Manajemen Laba

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dan deskriptif mengenai pengaruh perencanaan pajak dan beban pajak tanggungan pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2013 sampai dengan tahun 2015. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perencanaan pajak dan beban pajak tanggungan yang dikaitkan dengan manajemen laba yang dilakukan perusahaan. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yakni berkaitan dengan penelitian kuantitatif dan menggunakan data-data sekunder.

3.2. Objek, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah variabel-variabel yang meliputi perencanaan pajak dan beban pajak tanggungan. Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan maka penulis melakukan penelitian atas variabel-variabel tersebut pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *organization*, yaitu sumber data yang unit analisisnya merupakan respon dari divisi organisasi atau perusahaan. Dalam hal ini unit analisisnya adalah perusahaan-perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2013 sampai tahun 2015 dengan menggunakan data tahunan sebagai dasar penelitian.

Lokasi penelitian adalah tempat variabel-variabel penelitian dianalisis. Organisasi yang menjadi lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2013 sampai dengan tahun 2015.

3.3. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Menurut Beni Ahmad Saebani (2008, 128) jenis data yang diteliti data kuantitatif adalah penelitian yang menggunakan angka dalam penyajian data dan analisis yang menggunakan uji statistika. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang dipandu oleh hipotesis tertentu, yang salah satu tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah menguji hipotesis yang ditentukan sebelumnya. Selain itu menurut Creswell dalam Rachmat Trijono (2015, 17) penelitian kuantitatif yakni penyelidikan menyelidikan tentang masalah kemasayarakatan atau kemanusiaan yang didasarkan pada pengujian suatu teori yang tersusun atas variabel-variabel, diukur dengan bilangan bilangan, dan analisis dengan prosedur-prosedur statistik.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder (*secondary data*) merupakan data yang diperoleh peneliti secara tidak

langsung, tetapi diperoleh dari penyedia data atau pihak lain. Jadi peneliti untuk mendapatkan data dan informasi diperoleh melalui Bursa Efek Indonesia (BEI) dan situs resmi masing-masing perusahaan.

3.4. Operasionalisasi Variabel

Penelitian menggunakan dua macam variabel, variabel bebas (X) atau disebut juga variabel independen, dan variabel terikat (Y) atau disebut juga variabel dependen.

1) Variabel independen (*Independent Variabel*) adalah tipe yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel lain. Yang menjadi variabel independen dalam penelitian ini yaitu:

- a. Variabel X_1 : Perencanaan Pajak
 Indikator : *Tax Retention Rate (tingkat retensi pajak)*

Perencanaan pajak diukur dengan menggunakan rumus *tax retention rate* (tingkat retensi pajak), yang menganalisis suatu ukuran dari efektivitas manajemen pajak pada laporan keuangan perusahaan tahun berjalan (Wild et al. 2004). Rumus *tax retention rate* (tingkat retensi pajak) adalah (Wild et al., 2004):

$$\text{Tax Retention Rate (TRR)} = \frac{\text{Net Income}_{it}}{\text{Pretax Income (EBIT)}_{it}}$$

- b. Variabel X_2 : Beban Pajak Tangguhan
 Indikator : *Deferred Tax Expense*

Berdasarkan penelitian Phillips et al. (2003), pengukuran variabel DTE (*Deferred Tax Expense*) dalam penelitian ini dihitung dengan rumusan sebagai berikut:

$$\text{Deferred Tax Expense (DTE)}_{it} = \frac{\text{Beban Pajak Tangguhan}_t}{\text{Total Aset}_{t-1}}$$

2) Variabel Dependen (*Dependent Variabel*) adalah tipe variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen. Yang menjadi variabel dependen dalam penelitian ini yaitu:

- a. Variabel Y : Manajemen Laba
 Indikator : *Scaled Earning Changes it*

Berdasarkan penelitian Philips et al. (2003), rumus untuk variabel manajemen laba diukur dengan menggunakan pendekatan distribusi laba sebagai berikut:

$$\text{Scales Earning Changes}_{it} = \frac{\text{Net Income}_{it} - \text{Net Income}_{i(t-1)}}{\text{Market Value Equity}_{i(t-1)}}$$

Market Value Equity diukur dengan formula yakni :

$$MVE_{i(t-1)} = \text{Saham Yang Beredar} \times \text{Harga Saham}$$

Skala data Nominal

Tabel 6
Operasionalisasi Variabel
Tinjauan Perencanaan Pajak dan Beban Pajak Tangguhan serta Pengaruhnya
Terhadap Manajemen Laba.

Variabel	Indikator	Ukuran	Skala
Variabel X1 • Perencanaan pajak	<i>Tax Retention Rate (TRR)</i>	$\frac{Net\ Income_{it}}{Pretax\ Income\ (EBIT)_{it}}$	Rasio
Variabel X2 • Beban Pajak Tangguhan	<i>Deferred Tax Expense (DTE)</i>	$\frac{Deferred\ Tax\ Expense\ t}{Total\ Assets_{t-1}}$	Rasio
Variabel Y • Manajemen Laba	<i>Perubahan Laba (ΔE)</i>	$\frac{Net\ Income_{it} - Net\ Income_{i(t-1)}}{Market\ Value\ Equity_{i(t-1)}}$	Rasio

3.5. Metode Penarikan Sampel

Dalam penelitian ini populasi yang diambil adalah semua perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yaitu sebanyak 14 perusahaan (www.sahamok.com). Sample diambil dengan menggunakan metode *Purposive sampling*, artinya pengambilan sampel yang didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tertentu dari peneliti. Dalam penelitian ini sampel yang diambil adalah perusahaan makanan dan minuman pada tahun 2013-2015 dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tiga tahun penelitian yaitu pada tahun 2013-2015.

- 2) Perusahaan yang di-*dilesting*
- 3) Perusahaan sub sector makanan dan minuman yang tidak terdaftar di BEI selama periode 2013-2015
- 4) Perusahaan sampel menerbitkan laporan keuangan secara lengkap beserta data yang dibutuhkan penulis yaitu menerbitkan beban pajak tangguhan selama periode penelitian tahun 2013-2015 dan bisa diakses melalui website www.idx.co.id Bursa Efek Indonesia
- 5) Perusahaan yang melakukan akuisisi, merger, restrukturisasi, dan perubahan kelompok usaha

Tabel 7

Daftar 10 Perusahaan yang menjadi Objek Penelitian Makanan dan Minuman Tahun 2013-2015

No	Nama Perusahaan	Kode Perusahaan	Tanggal Listing di BEI
1	Wilmar Cahaya Indonesia Tbk, PT	CEKA	9-Jul-1996
2	Delta Djakarta Tbk, PT	DLTA	12-Feb-1984
3	Indofood Sukses Makmur Tbk.	INDF	14-Jul-1994
4	Multi Bintang Indonesia Tbk, PT	MLBI	17-Jan-1994
5	Mayora Indah Tbk, PT	MYOR	04-Jul-1990
6	Nippon Indosari Corporindo Tbk, PT	ROTI	28-Jun-2010
7	Sekar Bumi Tbk, PT	SKBM	28-Sep-2012
8	Sekar Laut Tbk, PT	SKLT	8-Sep-1993
9	Siantar Top Tbk, PT	STTP	16-Dec-1996
10	Ultrajaya Milk Industry & Trading Co. Tbk.	ULTJ	02-Jul-1990

(Sumber:www.sahamoke.com)

3.6. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode pengumpulan data sekunder yang diperoleh dari *homepage* Bursa Efek Inonesia (BEI) yaitu <http://www.idx.co.id> dilakukan untuk mengakses dan mengunduh laporan keuangan perusahaan makanan dan minuman yang telah dipublikasikan selama periode penelitian tahun 2013-2015. Data tersebut dimaksud agar dapat mendukung informasi menjadi lebih akurat dan lengkap.

3.7. Metode Pengolahan/ Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah atau dianalisis menggunakan metode analisis [statistik inferensial](#)

3.7.1. Uji Asumsi Klasik

Model regresi linier berganda dapat disebut sebagai model yang baik jika model tersebut memenuhi asumsi normalitas data dan bebas dari asumsi klasik. Proses pengujian asumsi klasik dilakukan bersama dengan proses uji regresi berganda sehingga langkah-langkah yang dilakukan dalam proses pengujian asumsi klasik menggunakan kotak kerja yang sama dengan regresi.

Uji asumsi klasik pada penelitian ini terdiri dari, uji normalitas, uji multikolinieritas, autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas.

1) Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah ada model regresi variabel independen dan dependennya memiliki distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Menurut Imam Ghozali (2009, 112) cara lain untuk uji normalitas selain grafik yaitu dengan uji statistik, uji statistik yang digunakan dalam penelitian ini untuk menguji normalitas residual adalah uji *statistic non parametik kolmogrop-smirnov*. Dengan uji ini dapat diketahui data yang digunakan berdistribusi normal atau tidak.

2) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas pada penelitian ini menggunakan uji gleser.

3) Uji Multikolinieritas

Penyimpangan model asumsi klasik ini adanya multikolinieritas dalam model regresi yang dihasilkan. Artinya antar variabel independen yang terdapat dalam model penelitian memiliki hubungan yang sempurna atau mendekati sempurna. Menurut Imam Ghozali (2009, 91), deteksi multikolinieritas dapat dilihat pada nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) dan *Tolerance*.

4) Uji Autokorelasi

Menurut Imam Ghozali (2009, 95), uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ atau sebelumnya. Jika terjadi korelasi maka dinamakan ada masalah autokorelasi. Uji autokorelasi dalam penelitian ini dilakukan melalui pengujian terhadap nilai uji *Durbin Watson* (DB).

3.8. Analisis Regresi Linier Berganda

Menurut V. Wiratna Sujarweni analisis regresi linier berganda memiliki satu variabel dependen dan lebih dari satu variabel independen (149, 2014). Berikut ini adalah persamaan regresi linier berganda.

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + \dots + e$$

Keterangan:

Y = Nilai Perusahaan (PBV)

a = Konstanta

b₁, b₂ = Koefisien regresi

X₁ = Perencanaan Pajak (TRR)

X₂ = Beban Pajak Tangguhan (DTE)

e = *error*

Untuk melakukan seluruh uji tersebut di atas maka penulis menggunakan *software* pengolah data, yaitu aplikasi statistik SPSS versi 21.

3.8.1. Statistik Deskriptif

Menurut V. Wiratna Sujarweni (2014, 29) adalah pengolahan data untuk tujuan mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sample atau populasi. Sample adalah sebagian unit populasi yang menjadi objek penelitian untuk memperkirakan karakteristik suatu populasi, sedangkan populasi adalah keseluruhan unit yang menjadi objek kegiatan statistik (Rachmat Trijono, 2015, 31). Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah atau dianalisis menggunakan metode analisis statistik deskriptif. Menurut Ronald E. Walpole (2001) dalam Edi Riadi (2016, 58) statistik deskriptif adalah metode-metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian suatu gugus data sehingga memberikan informasi yang berguna.

3.9. Pengujian Hipotesis

3.9.1. Uji Koefisien Determinasi (R²)

Menurut Noegroho Boedijoewono (2016, 277) Koefisien determinasi adalah bagian variasi total dari variabel dependen (Y) yang dijelaskan oleh garis regresi. Demikian pula pada regresi ganda, koefisien ini disebut koefisien determinasi ganda (R²) yaitu bagian dari variabel total dari Y yang dijelaskan oleh bidang regresi. Sedangkan menurut Imam Ghozali (2009, 83), koefisien determinasi R² pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Apabila

angka koefisien determinasi semakin kuat, yang berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Sedangkan nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi dependen amat terbatas.

3.9.2. Uji Pengaruh Secara Parsial (Uji Statistik t)

Menurut Imam Ghazali (2009, 128) Secara parsial, pengujian hipotesis dilakukan dengan uji t-test. Uji parsial digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen yaitu *Tax Retention Rate (TRR)* dan *Deferred Tax Expense (DTE)* terhadap variabel dependen yaitu *Perubahan Laba (ΔE)*.

Tahap-tahap pengujian yang dilakukan yaitu sebagai berikut:

Bentuk pengujian :

1. Merumuskan Hipotesis
2. Menentukan tingkat signifikannya yaitu 0.05
3. Menentukan keputusan
 - a. Bila nilai t-hitung < daripada nilai t-tabel maka H_0 diterima
 - b. Bila nilai t-hitung > daripada nilai t-tabel maka H_0 ditolak

3.9.3. Uji Pengaruh Secara Simultan (Uji Statistik f)

Uji ini digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen atau terikat, dalam hal ini untuk mengetahui Perputaran Kas berpengaruh signifikan terhadap laba. Selain dengan melihat nilai f hitungnya, pengambilan keputusan dapat dilihat dari signifikannya. Jika nilai signifikannya > 0.05 maka menunjukkan bahwa variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independennya atau H_0 diterima dan H_0 ditolak.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1. Hasil Pengumpulan Data

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah variabel-variabel perencanaan pajak dan beban pajak tanggungan pengaruhnya terhadap manajemen laba. Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan maka penulis melakukan penelitian atas variabel-variabel tersebut pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI.

Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *organization*, yaitu sumber data yang unit analisisnya merupakan respon dari divisi organisasi/perusahaan. Dalam hal ini unit analisis adalah divisi organisasi yaitu perusahaan-perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI.

Lokasi dalam penelitian ini adalah perusahaan makanan dan minuman yaitu perusahaan industri konsumsi terbesar di Indonesia yang memiliki peranan penting dalam sistem ekonomi di Indonesia. Di mana perusahaan makanan dan minuman merupakan salah satu sub sektor dari sektor manufaktur, yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dimana perusahaan tersebut bergerak dibidang industri makanan dan minuman. Di Indonesia perusahaan makanan dan minuman berkembang pesat, hal ini terlihat dari cukup banyaknya perusahaan yang terdaftar pada sub sektor makanan dan minuman di Bursa Efek Indonesia saat ini.

Dalam penelitian ini penulis mengambil objek penelitian berupa perusahaan *go public* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, khususnya pada perusahaan industri makanan dan minuman. Total perusahaan industri makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia kini berjumlah 14 perusahaan dan yang akan dijadikan sampel dalam penulisan ini berjumlah 10 perusahaan.

Alasan dipilih sektor industri ini karena sektor ini lebih stabil dan tidak terpengaruh oleh musim ataupun perubahan kondisi perekonomian (misalnya inflasi). Walaupun terjadi krisis ekonomi, permintaan pada perusahaan di sub sektor makanan dan minuman masih tetap ada karena dalam kondisi apapun konsumen tetap membutuhkan produk makanan dan minuman.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode *purposive sampling* yaitu pemilihan perusahaan perusahaan didasarkan pada kriteria-kriteria sebagai berikut:

- 1) Perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tiga tahun penelitian yaitu pada tahun 2013-2015. Artinya, jika perusahaan tidak terdaftar selama periode 2013-2015, maka perusahaan tidak dijadikan lokasi dalam penelitian. Keseluruhan perusahaan makanan dan minuman adalah 14 perusahaan.
- 2) Perusahaan yang di-*dilesting* selama tahun penelitian periode 2013-2015. Artinya, maka perusahaan tidak dijadikan lokasi dalam penelitian. Diantaranya perusahaan yang tidak dijadikan bahan penelitian adalah DAVO (Davomas

Abadi Tbk, PT), saham DAVO di delisting karena tidak memiliki keberlangsungan usaha (*going concern*). Selain itu AQUA (PT Aqua Golden Mississippi TBK delisting dari bursa karena *go private*.

- 3) Perusahaan makanan dan minuman yang tidak terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tiga tahun penelitian yaitu pada tahun 2013-2015. Artinya, jika perusahaan tidak terdaftar selama periode 2013-2015, maka perusahaan tidak dijadikan lokasi dalam penelitian. Keseluruhan perusahaan makanan dan minuman adalah 14 perusahaan, di luar 14 perusahaan tersebut yaitu Akasha Wira Internasional Tbk (ADES) pindah ke sub sektor Kosmetik dan Keperluan Rumah Tangga pada tanggal 1 Juli 2014.
- 4) Perusahaan sampel menerbitkan laporan keuangan yang dibutuhkan penulis yaitu menerbitkan beban pajak tangguhan selama selama periode penelitian tahun 2013-2015 dan bisa diakses melalui website www.idx.co.id Bursa Efek Indonesia. Artinya dari 14 perusahaan makanan dan minuman perusahaan yang menerbitkan beban pajak tangguhan selama periode 2013-2015 yaitu perusahaan Wilmar Cahaya Indonesia Tbk, PT (CEKA), Delta Djakarta Tbk, PT (DLTA), Indofood Sukses Makmur Tbk. (INDF), Multi Bintang Indonesia Tbk, PT (MLBI), Mayora Indah Tbk, PT (MYOR), Nippon Indonesia Corporindo Tbk, PT (ROTI), Sekar Bumi Tbk, PT (SKBM), Sekar Laut Tbk, PT (SKLT), Siantar Top Tbk, PT (STTP), Ultrajaya Milk Industry & Trading Co. Tbk. (ULTJ).
- 5) Perusahaan yang melakukan akuisisi, merger, restrukturisasi, dan perubahan kelompok usaha. Artinya perusahaan yang melakukan akuisisi, seperti yang dilakukan oleh Indofood CBD Sukses Makmur Tbk, PT (ICBD). Selain itu perusahaan yang melakukan perubahan kelompok usaha yaitu Akasha Wira Internasional Tbk (ADES) pindah ke sub sektor Kosmetik dan Keperluan Rumah Tangga.

Tabel 8

Daftar 10 perusahaan yang menjadi Objek Penelitian Makanan dan Minuman Tahun 2013-2015

No	Nama Perusahaan	Kode Perusahaan	Tanggal Listing di BEI
1	Wilmar Cahaya Indonesia Tbk, PT	CEKA	9-Jul-1996
2	Delta Djakarta Tbk, PT	DLTA	12-Feb-1984
3	Indofood Sukses Makmur Tbk.	INDF	14-Jul-1994
4	Multi Bintang Indonesia Tbk, PT	MLBI	17-Jan-1994
5	Mayora Indah Tbk, PT	MYOR	04-Jul-1990
6	Nippon Indosari Corporindo Tbk, PT	ROTI	28-Jun-2010
7	Sekar Bumi Tbk, PT	SKBM	28-Sep-2012
8	Sekar Laut Tbk, PT	SKLT	8-Sep-1993
9	Siantar Top Tbk, PT	STTP	16-Dec-1996
10	Ultrajaya Milk Industry & Trading Co. Tbk.	ULTJ	02-Jul-1990

(Sumber: www.sahamoke.com)

4.1.1. Gambaran Umum Perusahaan

1) PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk

PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk (sebelumnya Cahaya Kalbar Tbk) (CEKA) didirikan 03 Februari 1968 dengan nama CV Tjahaja Kalbar dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1971. Kantor pusat CEKA terletak di Kawasan Industri Jababeka II, Jl. Industri Selatan 3 Blok GG No.1, Cikarang, Bekasi 17550, Jawa Barat, sedangkan lokasi pabrik terletak di Kawasan Industri Jababeka, Cikarang, Jawa Barat dan Pontianak, Kalimantan Barat. Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan CEKA meliputi bidang industri makanan berupa industri minyak nabati (minyak kelapa sawit beserta produk-produk turunannya), biji tengkawang, minyak tengkawang dan minyak nabati spesialis; bidang perdagangan lokal, ekspor, impor, dan berdagang hasil bumi, hasil hutan, berdagang barang-barang keperluan sehari-hari. Saat ini produk utama yang dihasilkan CEKA adalah *Crude Palm Oil* (CPO) dan Palm Kernel serta turunannya.

2) PT Delta Djakarta Tbk

Delta Djakarta Tbk (DLTA) didirikan tanggal 15 Juni 1970 dan memulai kegiatan usaha komersialnya pada tahun 1933. Kantor pusat DLTA dan pabriknya berlokasi di Jalan Inspeksi Tarum Barat, Bekasi Timur – Jawa Barat. Pabrik “Anker Bir” didirikan pada tahun 1932 dengan nama *Archipel Brouwerij*. Dalam perkembangannya, kepemilikan dari pabrik ini telah mengalami beberapa kali perubahan hingga berbentuk PT Delta Djakarta pada tahun 1970. DLTA merupakan salah satu anggota dari San Miguel Group, Filipina. Induk usaha DLTA adalah San Miguel Malaysia (L) Private Limited, Malaysia. Sedangkan Induk usaha utama DLTA adalah Top Frontier Investment Holdings, Inc, berkedudukan di Filipina. Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan DLTA yaitu terutama untuk memproduksi dan menjual bir pilsener dan bir hitam dengan merek “Anker”, “Carlsberg”, “San Miguel”, “San Mig Light” dan “Kuda Putih”. DLTA juga memproduksi dan menjual produk minuman non-alkohol dengan merek “Sodaku”.

3) PT Indofood Sukses Makmur Tbk

PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) didirikan pada tanggal 14 Agustus 1990 dengan nama PT Panganjaya Intikusma, berdasarkan Akta Benny Kristianto, S.H., No. 228. Ruang lingkup kegiatan perusahaan antara lain mendirikan dan menjalankan industri makanan olahan, bumbu penyedap, minuman ringan, kemasan minyak goreng, penggilingan biji gandum dan pembuatan tekstil karung terigu. Kantor pusat perusahaan berlokasi di Sudirman Plaza, Indofood Tower, lantai 27, Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78, Jakarta, Indonesia, sedangkan pabrik dan perkebunan perusahaan dan entitas anak berlokasi di berbagai tempat di pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Malaysia. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1990. Indofood telah memiliki produk-produk dengan merek yang telah dikenal

masyarakat, antara lain mie instan (Indomie, Supermie, Sarimie, Sakura, Pop Mie, Pop Bihun dan Mie Telur Cap 3 Ayam), dairy (Indomilk, Cap Enaak, Tiga Sapi, Indomil Champ, Calci Skim, Orchid Butter dan Indoeskrim), makanan ringan (Chitato, Lays, Qtela, Cheetos dan JetZ), penyedap makanan (Indofood, piring Lombok, Indofood Racik dan Maggi), nutrisi & makanan khusus (Promina, SUN, Grovit dan Provita), minuman (Ichi Ocha, Tekita, Caféla, Club, 7UP, Tropicana Twister, Frutamin, dan Indofoof Freiss), tepung terigu & pasta (Cakra Kembar, Segitiga Biru, Kunci Biru, Lencana Merah, Chesa, La Fonte), minyak goreng dan mentega (Bimoli dan Palmia)

4) PT Multi Bintang Indonesia Tbk

PT Multi Bintang Indonesia Tbk dimulai dengan didirikannya *N.V Nederlandsch Indische Bierbrouwerijen* di Medan pada tahun 1921. Brewery pertama berada di Surabaya dan secara resmi beroperasi secara komersial pada 21 November 1931. Pada tahun 1936, tempat kedudukan perusahaan dipindahkan dari Medan ke Surabaya dan Heineken menjadi pemegang saham terbesar perusahaan dan berubah nama menjadi *N.V Heineken's Nederlandsch-Indische Bierbrouweerijen Maatschappij*. Lalu pada tahun 1951, Perusahaan kembali berubah nama menjadi *Heineken's Indonesische Bierbrouwerijen Maatschappij N.V.* Sejalan dengan meningkatnya pertumbuhan perusahaan, brewery kedua dibangun di Tangerang. Di tahun yang sama, perusahaan berganti nama menjadi PT Perusahaan Bir Indonesia. Brewery kedua ini kemudian mulai beroperasi pada tahun 1973. Pada 1 January 1981, Perusahaan mengambil alih PT Brasseries de l'Indonesia yang memproduksi bir dan minuman ringan di Medan. Di 2014, Multi Bintang sekali lagi menciptakan tonggak sejarah dengan membangun fasilitas produksi baru yang dilengkapi teknologi canggih untuk memproduksi minuman non-alkohol di Sampang Agung, Jawa Timur. Dengan investasi sebesar Rp 210 miliar, fasilitas produksi ini dibangun hanya dalam waktu 9 bulan dan secara Resmi beroperasi pada Agustus 2014. Perusahaan pun identic dengan salah satu produk unggulan yaitu Bir Bintang, sebuah merek ikonik dan telah dikenal luas di Indonesia. Multi Bintang juga memproduksi dan memasarkan merek bir premium internasional, Heineken®; kategori 0,0% alkohol, minuman bebas alkohol Bintang Zero dan Bintang Radler 0,0%; dan inovasi terbaru Bintang Radler, kombinasi unik Bir Bintang dengan jus lemon alami yang memberikan kesegaran ganda, sekarang tersedia juga dalam varian berbeda, Bintang Radler Grapefruit dengan jus grapefruit alami; minuman fine soda, Fayrouz, serta minuman ringan Green Sands

5) PT Mayora Indah Tbk

PT Mayora Indah Tbk (MYOR) didirikan dengan Akta No. 204 tanggal 17 Februari 1977 dari Poppy Savitri Parmanto, S.H., pengganti dari Ridwan Suselo, S.H., notaris di Jakarta. Ruang lingkup kegiatan perusahaan adalah menjalankan usaha dalam bidang industri, perdagangan serta agen/perwakilan. Saat ini perusahaan menjalankan bidang usaha industri makanan, kembang gula,

dan biskuit. Perusahaan menjual produknya di pasar lokal dan luar negeri. Perusahaan memulai usahanya secara komersial pada bulan Mei 1978. Kantor pusat perusahaan terletak di Gedung Mayora, Jl. Tomang Raya No. 21-23, Jakarta, sedangkan pabrik perusahaan terletak di Tangerang dan Bekasi. Saat ini, Mayora menjalankan bidang usaha industri biskuit (Roma, Danisa, Royal Choice, Better, Muuch Better, Slai O Lai, Sari Gandum, Sari Gandum Sandwich, Coffejoy, Chees'kress), kembang gula (Kopiko, Kis, Tamarin, Juizy Milk), wafer (Beng beng, Astor, Roma), coklat (Choki-choki), kopi (Torabika dan Kopiko) dan makanan kesehatan seperti Energen, serta menjual produknya di pasar lokal dan luar negeri.

6) PT Nippon Indosari Corporindo Tbk

PT Nippon Indosari Corporindo Tbk (ROTI) didirikan dalam kerangka Undang-undang penanaman Modal Asing No. 1 Tahun 1967, yang kemudian diubah dengan Undang-undang No. 11 tahun 1970, berdasarkan akta notaris No. Tanggal 8 Maret 1995 dari Benny Kristanto, S.H. berdasarkan Pasal 3 anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup usaha utama perusahaan yang sedang dijalankan adalah di bidang pabrikasi, penjualan, dan distribusi roti. Kantor pusat perusahaan berkedudukan di Kawasan Industri MM2100 Cibitung – Bekasi. Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup usaha utama PT Nippon Indosari Corporindo Tbk, bergerak di bidang pabrikasi, penjualan dan distribusi roti (roti tawar, roti manis, roti berlapis, cake, dan bread crumb) dengan merek “Sari Roti”. Pendapatan utama PT Nippon Indosari Corporindo Tbk berasal dari penjualan roti tawar dan roti manis.

7) PT Sekar Bumi Tbk

PT Sekar Bumi Tbk (SKBM) didirikan 12 April 1973 dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1974. Kantor pusat SKBM berlokasi di Plaza Asia, Lantai 2, Jl. Jend. Sudirman Kav. 59, Jakarta 12190 – Indonesia dan pabrik berlokasi di Jalan Jenggolo 2 No. 17 Waru, Sidoarjo serta tambak di Bone dan Mare, Sulawesi. Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan SKBM adalah dalam bidang usaha pengolahan hasil perikanan laut dan darat, hasil bumi dan peternakan. Sekar Bumi memiliki 2 divisi usaha, yaitu hasil laut beku nilai tambah (udang, ikan, cumi-cumi, dan banyak lainnya) dan makanan olahan beku (dim sum, udang berlapis tepung roti, bakso seafood, sosis, dan banyak lainnya). Selain itu, melalui anak usahanya, Sekar Bumi memproduksi pakan ikan, pakan udang, mete dan produk kacang lainnya. Produk-produk Sekar Bumi dipasarkan dengan berbagai merek, diantaranya SKB, Bumifood dan Mitraku.

8) PT Sekar Laut Tbk

PT Sekar Laut Tbk (SKLT) didirikan 19 Juli 1976 dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1976. Kantor pusat SKLT berlokasi di Wisma Nugra Santana, Lt. 7, Suite 707, Jln. Jend. Sudirman Kav. 7-8, Jakarta 10220 dan Kantor cabang berlokasi di Jalan Raya Darmo No. 23-25, Surabaya, serta

Pabrik berlokasi di Jalan Jenggolo II/17 Sidoarjo. Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan SKLT meliputi bidang industri pembuatan kerupuk, saos tomat, sambal, bumbu masak dan makan ringan serta menjual produknya di dalam negeri maupun di luar negeri. Produk-produknya dipasarkan dengan merek FINNA.

9) PT Siantar Top Tbk

Siantar Top Tbk (STTP) didirikan tanggal 12 Mei 1987 dan mulai beroperasi secara komersial pada bulan September 1989. Kantor pusat Siantar Top beralamat di Jl. Tambak Sawah No. 21-23 Waru, Sidoarjo, dengan pabrik berlokasi di Sidoarjo (Jawa Timur), Medan (Sumatera Utara), Bekasi (Jawa Barat) dan Makassar (Sulawesi Selatan). Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Siantar Top terutama bergerak dalam bidang industri makanan ringan, yaitu mie (snack noodle, antara lain: Soba, Spix Mie Goreng, Mie Gemes, Boyki, Tamiku, Wilco, Fajar, dll), kerupuk (crackers, seperti French Fries 2000, Twistko, Leanet, Opotato, dll), biskuit dan wafer (Goriorio, Gopotato, Go Malkist, Brio Gopotato, Go Choco Star, Wafer Stick, Superman, Goriorio Magic, Goriorio Otamtam, dll), dan kembang gula (candy dengan berbagai macam rasa seperti: DR. Milk, Gaul, Mango, Era Cool, dll). Selain itu, STTP juga menjalankan usaha percetakan melalui anak usaha (PT Siantar Megah Jaya).

10) PT Ultra Jaya Milk Industry Tbk

PT Ultra Jaya Milk Industry Tbk (ULTJ), didirikan dengan Akta N0. 8 tanggal 2 November 1971 juncto Akta Perubahan No. 71 tanggal 29 Desember 1971 yang dibuat di hadapan Kohar Andasmita. S.H., Notaris di Bandung. Perseroan bergerak dalam bidang industri makanan dan minuman. Di bidang minuman, memproduksi minuman seperti susu cair, sari buah, teh, minuman tradisional dan minuman kesehatan, yang diolah dengan teknologi UHT (Ultra High Temperature) dan dikemas dalam kemasan karton aseptik. Di bidang makanan, perseroan memproduksi susu kental manis, susu bubuk dan konsentrat buah-buahan tropis. Perseroan memiliki kantor pusat dan pabrik yang berlokasi di Jl. Raya Cimareme 131 Padalarang Kabupaten Bandung 40552. Merek utama dari produk-produk Ultrajaya antara lain: susu cair (Ultra Milk, Ultra Mimi, Susu Sehat, Low Fat Hi Cal), teh (Teh Kotak dan Teh Bunga), minuman kesehatan dan lainnya (Sari Asam, Sari Kacang Ijo dan Coco Pandan Drink), susu bubuk (Morinaga), susu kental manis (Cap Sapi) dan konsentrat buah-buahan (Ultra).

4.1.2. Perhitungan Perencanaan Pajak, Beban Pajak Tangguhan Pada Perusahaan makanan dan minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia

1) Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak (*tax planning*) adalah Usaha yang mencakup perencanaan perpajakan agar pajak yang dibayar oleh perusahaan benar-benar

efisien. Selain itu merupakan rangkaian strategi untuk mengatur akuntansi dan keuangan perusahaan untuk meminimalkan kewajiban perpajakan dengan cara-cara yang tidak melanggar peraturan perpajakan (*in legal way*). Dalam arti yang lebih luas meliputi keseluruhan fungsi manajemen perpajakan. Chairil Anwar Pohan (2015, 13).

Perencanaan pajak diukur dengan menggunakan rumus *tax retention rate* (tingkat retensi pajak), yang menganalisis suatu ukuran dari efektivitas manajemen pajak pada laporan keuangan perusahaan tahun berjalan (Wild et al. 2004). Rumus *tax retention rate* (tingkat retensi pajak) adalah (Wild et al., 2004):

$$TRR = \frac{Net\ Income_{it}}{Pretax\ Income\ (EBIT)_{it}}$$

Tabel 9
Perencanaan Pajak (*Tax Retention Rate*)

KODE	2013	2014	2015	MEAN
CEKA	0,751780433	0,721011157	0,74891708	0,740569557
DLTA	0,754746345	0,75903563	0,76757367	0,760451881
INDF	0,731715606	0,707273526	0,651281397	0,696756843
MLBI	0,74272026	0,737109808	0,735538181	0,738456083
MYOR	0,780502636	0,773934786	0,762107356	0,772181593
ROTI	0,749580621	0,746066319	0,715234753	0,736960564
SKBM	0,744102575	0,812366648	0,748660787	0,76837667
SKLT	0,689249428	0,701035834	0,733000337	0,707761866
STTP	0,801385222	0,736023473	0,800434827	0,779281174
ULTJ	0,744475364	0,754915805	0,746565852	0,74865234
MEAN	0,749025849	0,744877299	0,740931424	
MAX	0,801385222	0,812366648	0,800434827	
MIN	0,689249428	0,701035834	0,651281397	

(Sumber : www.idx.co.id diolah oleh penulis, tahun 2017)

Berdasarkan tabel 9 di atas, dari tahun 2013-2015 nilai rata-rata tertinggi berada pada perusahaan PT Siantar Top Tbk (STTP) yaitu sebesar 0,779281174. Hal ini mengindikasikan bahwa PT Siantar Top Tbk (STTP) telah melakukan perencanaan pajak dengan baik karena semakin tinggi nilai perencanaan pajak maka perusahaan semakin efektif dalam melakukan perencanaan pajak. Sehingga pajak yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut akan menjadi kecil dan berusaha untuk membayar pajak dengan cara melakukan manajemen laba.

2) Beban Pajak Tangguhan

Beban pajak tangguhan adalah pajak yang kewajibannya ditunda sampai waktu yang ditentukan atau diperbolehkan, sebagai akibat dari perbedaan waktu (temporer) antara standar akuntansi keuangan dengan peraturan perpajakan dan akibat dari saldo kerugian yang dapat dikompensasikan pada periode mendatang. Menurut Phillips et al. (2003), pengukuran variabel DTE (*Deferred Tax Expense*) dalam penelitian ini dihitung dengan rumusan sebagai berikut:

$$Deferred\ Tax\ Expense\ (DTE)_{it} = \frac{Beban\ Pajak\ Tangguhan_t}{Total\ Aset_{t-1}}$$

Tabel 10
Beban Pajak Tangguhan (*Deferred Tax Expense*)

KODE	2013	2014	2015	MEAN
CEKA	0,001563352	0,001035482	0,000488034	0,001028956
DLTA	0,007391192	0,000482585	0,005088291	0,004320689
INDF	0,008471629	0,005191555	0,004414856	0,006026013
MLBI	0,034064553	0,006579139	0,016327178	0,01899029
MYOR	0,000050067	0,000354744	0,000337294	0,000247369
ROTI	0,001448158	0,00869975	0,004454876	0,004867595
SKBM	0,001605013	0,002376097	0,000215941	0,001399017
SKLT	0,004272857	0,006040435	0,003475288	0,004596193
STTP	0,001157443	0,002002789	0,001615307	0,001591846
ULTJ	0,004573838	0,007467188	0,004805993	0,005615673
MEAN	0,00645981	0,004022977	0,004122306	
MAX	0,034064553	0,00869975	0,016327178	
MIN	0,000050067	0,000354744	0,000215941	

(Sumber : www.idx.co.id diolah oleh penulis, tahun 2017)

Berdasarkan tabel 10 di atas, dari tahun 2013-2015 nilai rata-rata tertinggi berada pada PT Multi Bintang Indonesia Tbk (MLBI) yaitu sebesar 0,01899029. Hal ini mengindikasikan bahwa PT Multi Bintang Indonesia Tbk (MLBI) telah melakukan beban pajak tangguhan dengan baik karena semakin tinggi nilai beban pajak tangguhan maka semakin besar perusahaan melakukan manajemen laba untuk menghindari kerugian.

4.1.3. Perhitungan Manajemen Laba Pada Perusahaan Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia

1) Manajemen Laba

Manajemen laba merupakan suatu tindakan yang mengatur laba sesuai dengan yang dikehendaki oleh pihak tertentu atau terutama oleh manajemen perusahaan (*company management*). Tindakan *earnings management* sebenarnya didasarkan oleh berbagai tujuan dan maksud-maksud yang terkandung didalamnya. Ilham Fahmi (2013, 279). Berdasarkan penelitian Philips et al. (2003), rumus untuk variabel manajemen laba diukur dengan menggunakan pendekatan distribusi laba sebagai berikut:

$$\text{Scaled Earning Change} = \frac{\text{Net Income } i - \text{Net Income } i(t-1)}{\text{Market Value Equity } (t-1)}$$

Tabel 11
Manajemen Laba

KODE	2013	2014	2015	MEAN
CEKA	0,034775545	-0,139481562	0,293772693	0,063022225
DLTA	0,013977942	0,002958305	-0,015444676	0,00049719
INDF	-0,026565694	0,018452873	-0,021133404	-0,009748742
MLBI	18,9938365	-10,36229631	-0,011834391	2,873235266
MYOR	0,023892961	-0,032552017	0,044972189	0,012104378
ROTI	0,006346	0,005933152	0,011680945	0,007986699
SKBM	0,137223036	0,07659033	-0,054977843	0,052945174
SKLT	0,027967734	0,043560007	0,015494573	0,029007438
STTP	0,028942846	0,004530144	0,016451886	0,016641626
ULTJ	-0,007367914	-0,003236413	0,022340033	0,003911902
MEAN	1,923302896	-1,03855415	0,030132200	
MAX	18,9938365	0,07659033	0,293772693	
MIN	-0,026565694	-10,36229631	-0,054977843	

(Sumber : www.idx.co.id diolah oleh penulis, tahun 2017)

Berdasarkan tabel 11 di atas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2013-2015 nilai rata-rata manajemen laba tertinggi berada pada PT Multi Bintang Indonesia Tbk (MLBI) sebesar 2,873235266, artinya PT Multi Bintang Indonesia Tbk (MLBI) menghindari penurunan laba. Dimana jika nilai manajemen laba bernilai positif, maka perusahaan menghindari penurunan laba. Begitupun dengan nilai perusahaan lainnya yang bernilai nol atau positif artinya bahwa perusahaan menghindari penurunan laba. Sedangkan pada perusahaan PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) yaitu sebesar -0,009748742, artinya bahwa PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) bernilai negatif maka perusahaan tersebut menghindari pelaporan kerugian.

4.2. Analisis Data

Pengujian “Tinjauan Perencanaan Pajak dan Beban Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia” dilakukan dengan pengujian statistik. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda dengan bantuan *Statistical Product Service Solution* (SPSS) versi 21. Beberapa pengujian yang dilakukan yaitu uji asumsi klasik (uji normalitas, uji heteroskedastitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi), uji hipotesis (uji koefisien determinasi, uji koefisien secara bersama – sama atau uji f, uji koefisien secara parsial atau uji t). Adapun variabel yang diteliti oleh penulis yaitu Perencanaan Pajak (X_1) dengan indikator membagi *Net Income* dengan *Pretax Income*, sedangkan Beban Pajak Tangguhan (X_2) dengan indikator membagi *Deferred Tax Expense* dengan *Total Asset* periode sebelumnya, dan Manajemen Laba (Y) dengan indikator mengurangi *Net Income* dengan *Net Income* periode sebelumnya, lalu dibagi dengan *Market Value Equity*.

4.2.1. Analisis Statistik Deskriptif

Penelitian statistik deskriptif memberikan gambaran dari suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, *sum*, *range*, *kurtosis*, dan *skewnes* kemencengan distribusi (Ghozali,2013,19). Apabila nilai rata-rata (*mean*) lebih besar daripada standar deviasi maka kualitas data adalah lebih baik.

Pada penelitian ini statistik deskriptif akan menggambarkan deskripsi dari masing-masing variabel.

Tabel 12
Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Perencanaan Pajak	30	,6512814	,8123666	,744944857	,0329304168
Beban Pajak Tangguhan	30	,0000501	,0340646	,004868364	,0065459745
Manajemen Laba	30	-10,3622963	18,9938365	,304960316	4,0064526601
Valid N (listwise)	30				

(Sumber : Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 21, Tahun 2017)

Tabel 12 Menunjukkan hasil analisis statistik deskriptif dengan jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian sebanyak sepuluh sampel perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI dan jangka waktu pengambilan sampel selama 3 tahun sehingga jumlah data keseluruhan $N=30$. Dari hasil statistik deskriptif diketahui bahwa nilai manajemen laba (Y) yang dihitung adalah -10,3622963 untuk nilai terendah dimiliki PT Multi Bintang Indonesia Tbk atau MLBI pada tahun 2014 dan 18,9938365 untuk nilai tertinggi dimiliki PT Multi Bintang Indonesia Tbk atau MLBI pada tahun 2013, sedangkan nilai rata-rata sebesar 0,304960316 dan standar deviasi sebesar 4,0064526601.

Nilai perencanaan pajak yang dihitung menggunakan indikator *Tax Retention Rate* (X_1) adalah antara 0,6512814 hingga 0,8123666 dengan nilai perencanaan pajak terendah dimiliki PT Indofood Sukses Makmur atau INDF pada tahun 2015 dan nilai perencanaan pajak tertinggi dimiliki PT Sekar Bumi atau SKBM pada tahun 2015, sedangkan nilai rata-rata sebesar 0,744944857 dengan standar deviasi 0,0329304168.

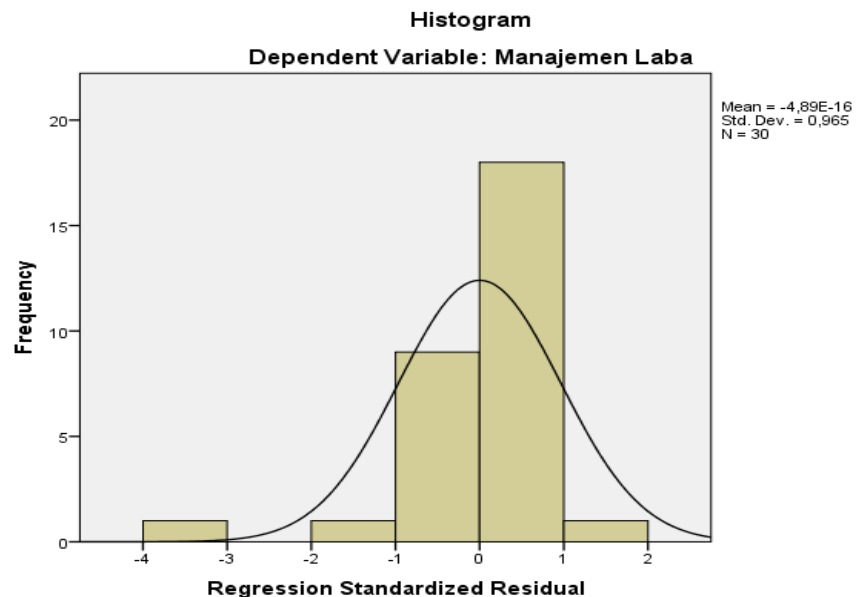
Nilai beban pajak tangguhan yang dihitung menggunakan indikator *Deferred Tax Expense* dibagi dengan total asset (X_2) adalah 0,000501 hingga 0,0340646 dengan nilai beban pajak tangguhan terendah dimiliki PT Mayora Indah Tbk atau MYOR pada tahun 2013 dan nilai beban pajak tangguhan tertinggi dimiliki PT Multi Bintang Indonesia Tbk atau MLBI pada tahun 2013, sedangkan nilai rata-rata sebesar 0,004868364 dengan standar deviasi 0,0065459745.

4.2.2. Uji Asumsi Klasik

Sebuah model regresi yang baik adalah model dengan kesalahan peramalan yang seminimal mungkin. Uji asumsi klasik dilakukan agar hasil regresi memenuhi kriteria BLUE (*Best, Linier, Unbiased Estimator*). Berikut termasuk ke dalam uji asumsi klasik:

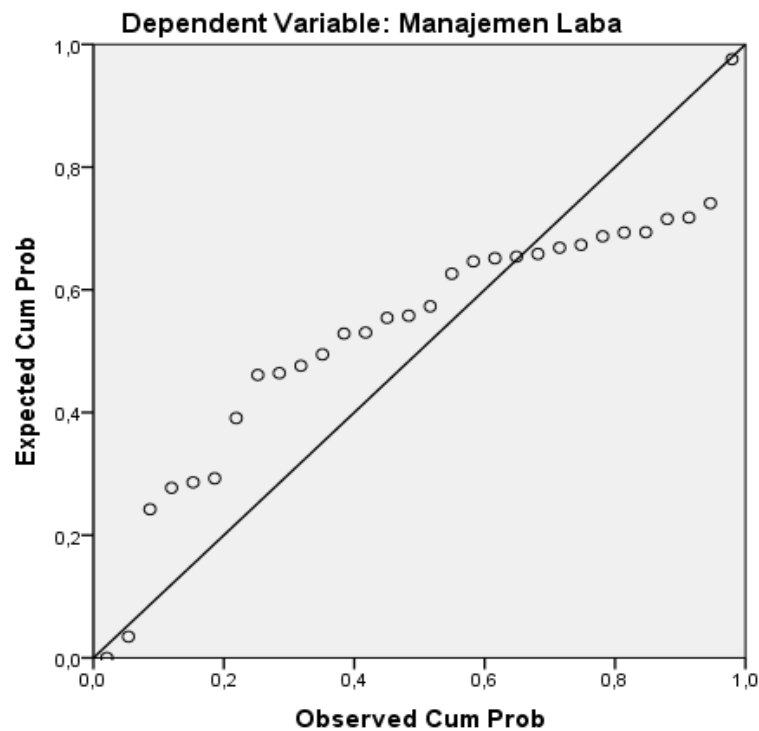
1) Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variable pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t atau uji F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Metode yang digunakan adalah grafik histogram dan *Normal Probability Plot (P-P Plot)* (Imam Ghozali, 2016, 154). Hasil pengujian grafik dapat dilihat pada gambar 2 dan gambar 3.



Gambar 2
Hasil Uji Normalitas dengan grafik Histogram

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Gambar 3
Hasil Uji Normalitas dengan Grafik P-Plot

Gambar 3 menunjukkan uji normalitas pada gambar histogram data distribusi nilai residu (*error*) terdistribusi normal. Gambar 3 pada *normal probability plot* terlihat titik-titik (data) menyebar di sekitar garis diagonal (normal) serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal (normal). Selain metode grafik, penelitian ini juga menggunakan analisis statistik untuk menguji normalitas data. Analisis statistik dianggap dapat menggambarkan hasil yang lebih akurat. Analisis statistik yang digunakan untuk menguji normalitas data adalah menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov. Dengan uji ini dapat diketahui sampel yang diamati terdistribusi secara normal atau tidak. Jika data tersebut mempunyai *level of significance* sama atau diatas 5% ($\alpha \geq 0,05$) maka data tersebut terdistribusi secara normal. Sedangkan jika kurang dari 5% ($\alpha \leq 0,05$) maka data tersebut tidak terdistribusi secara normal.

Tabel 13
Hasil Uji Normalitas Kolmogrov-smirnov Test
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Perencanaan Pajak	Beban Pajak Tanggungan	Manajemen Laba	Unstandardized Residual
N		30	30	30	30
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,744944857	,004868364	,304960316	,0000000
	Std. Deviation	,0329304168	,0065459745	4,006452660	2,79396522
	Absolute	,144	,231	,468	,226
Most Extreme Differences	Positive	,114	,214	,468	,218
	Negative	-,144	-,231	-,423	-,226
	Kolmogorov-Smirnov Z	,788	1,264	2,562	1,240
Asymp. Sig. (2-tailed)		,563	,082	,000	,092

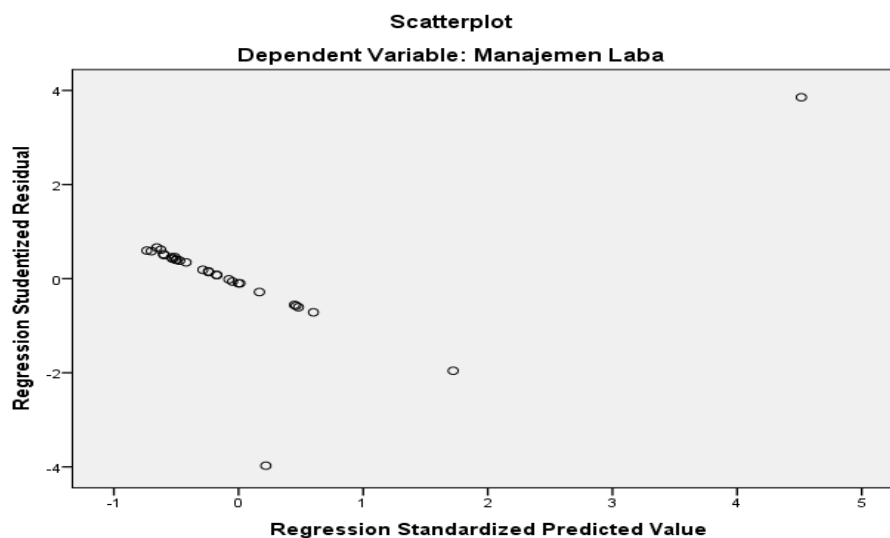
a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Tabel 13 menunjukkan nilai signifikansi yang diperoleh yaitu 0,092 dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 atau $0,092 > 0,05$ maka nilai terdistribusi normal dan memenuhi syarat uji normalitas.

2) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah data dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau yang tidak terjadi heteroskedastisitas. (Imam Ghazali, 2016, 134). Uji Heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat pola titik-titik pada scatterplots regresi. Jika titik-titik menyebar dengan pola yang tidak jelas maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Hasil dari uji heteroskedastisitas disajikan pada gambar 4



Gambar 4
Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Scatterplot

Gambar 3 menunjukkan scatterplot terlihat bahwa titik-titik pada grafik menyebar dengan pola yang tidak jelas, maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada model regresi. Selain metode grafik, penelitian ini juga menggunakan analisis statistik untuk menguji heteroskedastisitas. Analisis statistik dianggap dapat menggambarkan hasil yang lebih akurat. Analisis statistik yang digunakan untuk menguji heteroskedastisitas adalah menggunakan Uji Glejser. Dengan uji ini dapat diketahui sampel yang diamati memiliki model regresi mengandung atau terbebas dari heteroskedastisitas. Jika data tersebut mempunyai *level of significance* sama atau diatas 5% ($\alpha \geq 0,05$) maka model regresi tersebut terbebas dari gejala heteroskedastisitas. Sedangkan, jika kurang dari 5% ($\alpha \leq 0,05$) maka model regresi tersebut mengandung adanya heteroskedastisitas. Berikut ini hasil uji heteroskedastisitas menggunakan Uji Gleser.

Tabel 14
Hasil Uji Heterokedastitas dengan Uji Gleser
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	1,060	8,655		,123	,903
1 PERENCANAAN PAJAK	-,244	11,536	-,004	-,021	,983
BEBAN PAJAK TANGGUHAN	162,781	58,034	,481	2,805	,009

a. Dependent Variable: RES2

(Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 21, Tahun 2017)

Berdasarkan Tabel 14 menunjukkan bahwa nilai signifikansi variabel independen yaitu perencanaan pajak (X_1) sebesar 0,983 lebih besar dari 0,005 atau variabel perencanaan pajak sebesar $0,983 > 0,05$ yang artinya terbebas dari gejala heteroskedastisitas. Sedangkan beban pajak tangguhan (X_2) sebesar 0,009 atau $0,009 < 0,05$ atau variabel beban pajak tangguhan sebesar $0,009 < 0,05$ yang artinya terjadi heteroskedastisitas pada variabel beban pajak tangguhan (X_2).

3) Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Untuk mendeteksi masalah multikolonieritas penelitian ini menggunakan nilai *Tolerance* dan *VIF (Variance Inflation Factor)*. Regresi yang terbebas dari masalah multikolonieritas yaitu apabila nilai *tolerance* $> 0,10$ dan nilai *VIF* < 10 . Hasil uji multikolonieritas dapat dilihat pada tabel. berikut:

Tabel 15
Hasil uji Multikolonieritas
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	-14,486	12,440		-1,165	,254		
1 Perencanaan Pajak	16,945	16,580	,139	1,022	,316	,970	1,031
Beban Pajak Tangguhan	445,362	83,410	,728	5,339	,000	,970	1,031

a. Dependent Variable: Manajemen Laba

(Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 21, Tahun 2017)

Berdasarkan Tabel. Dapat dilihat bahwa Nilai *Tolerance* variabel perencanaan pajak (X_1), beban pajak tangguhan (X_2) menunjukkan nilai *tolerance* $> 0,10$ dan nilai VIF < 10 . Untuk variabel perencanaan pajak sebesar $0,970$ atau $0,970 > 0,1$ dengan nilai VIF sebesar $1,031$ atau $1,031 < 10$, nilai *tolerance* variabel beban pajak tangguhan (X_2) sebesar $0,970$ atau $0,970 > 0,1$ dengan nilai VIF sebesar $1,031$ atau $1,031 < 10$. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa variabel independen yang digunakan dalam model ini regresi terbebas dari gejala multikolonieritas.

4) Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu periode $t-1$ (sebelumnya). Uji autokorelasi dilakukan dengan menghitung berdasarkan kriteria *Durbin Watson*. Untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi pada model regresi dilakukan dengan uji *Durbin-Watson* (DW) dengan taraf signifikansi $0,05$. Syarat tidak adanya autokorelasi yaitu $d_L < d_u < 4 - d_u$. Hasil dari uji autokorelasi disajikan pada tabel 16.

Tabel 16
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,717 ^a	,514	,478	2,8955969654	2,288

a. Predictors: (Constant), Beban Pajak Tangguhan, Perencanaan Pajak

b. Dependent Variable: Manajemen Laba

(Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 21, Tahun 2017)

Tabel 14 menunjukkan nilai *Durbin-Watson* (DW) sebesar $2,316$ dengan (k, n) jadi $(2, 30)$ dimana k adalah jumlah variabel independen dan n adalah data observasi. Maka dengan taraf signifikansi $0,05$ diperoleh nilai d_L dan d_u yaitu d_L sebesar $1,297$ dan d_u sebesar $1,567$ sedangkan nilai $4 - d_u$ adalah $2,433$. Hasil uji menggunakan *Durbin-Watson* menunjukkan $(1,297 < 1,567 < 2,433)$, sehingga disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi pada model regresi.

4.2.3. Uji Hipotesis Penelitian

Uji hipotesis bertujuan untuk menjawab sementara mengenai rumusan masalah yang belum dibuktikan kebenarannya. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model analisis regresi berganda (*multiple regression analysis*), yaitu dilakukan melalui analisis uji koefisien determinasi (R^2), uji koefisien regresi secara bersama-sama (uji f) dan uji koefisien regresi secara parsial (uji t).

1) Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar persentase sumbangan pengaruh variabel independen (perencanaan pajak dan beban pajak tangguhan) secara serentak terhadap variabel dependen (manajemen laba). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol sampai dengan satu. Hasil dari uji koefisien determinasi (R^2) dengan manajemen laba menggunakan rasio disajikan pada Tabel 17.

Tabel 17
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,717 ^a	,514	,478	2,8955969654	2,288

a. Predictors: (Constant), Beban Pajak Tangguhan, Perencanaan Pajak

b. Dependent Variable: Manajemen Laba

(Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 21, Tahun 2017)

Tabel 17 menunjukkan hasil uji koefisien determinasi yang terdiri dari nilai korelasi berganda (R), koefisien determinasi (*R Square*), koefisien determinasi yang disesuaikan (*Adjusted R Square*) dan ukuran kesalahan prediksi (*Std Error of the Estimate*).

R Square (R^2) menunjukkan nilai koefisien determinasi yaitu persentase sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen jika dalam regresi menggunakan tidak lebih dari dua variabel independen.

Adjusted R Square adalah *R Square* yang telah disesuaikan yaitu persentase sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen jika dalam regresi menggunakan lebih dari dua variabel independen. Nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,478 yang berarti bahwa variabel independen (perencanaan pajak dan beban pajak tangguhan) mempengaruhi variabel dependen (manajemen laba) sebesar 47,8% dan sisanya sebesar 52,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

Standard Error of the Estimate adalah ukuran kesalahan prediksi. Kesalahan yang dapat terjadi dalam memprediksi Manajemen Laba 2,8955969654.

2) Uji Koefisien Regresi Secara Bersama-sama (Uji f)

Uji f atau uji koefisien regresi secara bersama-sama digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen perencanaan pajak (X_1), beban pajak tanggungan (X_2), secara bersama-sama terhadap manajemen laba (Y). Seluruh variabel independen dapat dikatakan memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen jika nilai f hitung lebih besar dari f tabel ($f_{hitung} > f_{tabel}$) atau jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05 (Sig. < 0,05). Hasil dari uji f disajikan pada Tabel 18.

Tabel 18
Hasil Uji Koefisien Regresi Secara Bersama-sama (Uji f)
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	239,117	2	119,559	14,260	,000 ^b
Residual	226,381	27	8,384		
Total	465,498	29			

a. Dependent Variable: Manajemen Laba

b. Predictors: (Constant), Beban Pajak Tanggungan, Perencanaan Pajak

(Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 21, Tahun 2017)

Tabel 18 menunjukkan hasil uji f secara simultan variabel independen f hitung sebesar 14,260. Dengan menggunakan tingkat keyakinan 95%, $\alpha = 5\%$, df 1 (jumlah variabel-1) = 2, dan df 2 (n-k-1) atau 30-2-1=27 (n adalah jumlah data observasi dan k adalah jumlah variabel independen), sehingga diperoleh f tabel sebesar 3,354 atau ($f_{hitung} > f_{tabel}$) (14,260 > 3,354). Jika dilihat dari signifikansi didapat nilai sebesar 0,000 (Sig.< 0,05). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kedua variabel independen yaitu perencanaan pajak dan beban pajak tanggungan secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap manajemen laba.

3) Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t)

Uji t atau uji koefisien regresi secara parsial digunakan untuk mengetahui apakah secara parsial setiap variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Koefisien regresi masing-masing variabel independen dikatakan memiliki pengaruh terhadap variabel dependen jika t hitung lebih besar dari t tabel ($t_{hitung} > t_{tabel}$). Nilai t tabel dicari pada signifikansi 0,05/2 = 0,025 (uji dua sisi) dengan df = n-k-1 atau df = 30-2-1 = 27. Hasil dari uji t disajikan pada Tabel 19.

Tabel 19
Hasil Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	-14,486	12,440		-1,165	,254
1 Perencanaan Pajak	16,945	16,580	,139	1,022	,316
Beban Pajak Tangguhan	445,362	83,410	,728	5,339	,000

a. Dependent Variable: Manajemen Laba

(Sumber : Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 21, Tahun 2017)

Analisis Uji t berdasarkan tabel adalah sebagai berikut :

- a. Perencanaan Pajak (X_1) terhadap Manajemen Laba (Y)

Variabel Perencanaan Pajak (X_1) memiliki nilai signifikansi 0,316 lebih dari taraf nyata 0,05 atau ($0,316 > 0,05$). Hal ini sesuai dengan hasil pengujian statistik yang membandingkan antara t hitung dengan t tabel, dimana nilai t hitung sebesar 1,022 dan t tabel yaitu sebesar 2,052 maka ($t_{hitung} < t_{tabel}$) ($1,022 < 2,052$). Oleh karena itu, variabel perencanaan pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.

- b. Beban Pajak Tangguhan (X_2) terhadap Manajemen Laba (Y)

Variabel Beban Pajak Tangguhan (X_2) memiliki nilai signifikansi 0,000 kurang dari taraf nyata 0,05 atau ($0,000 < 0,05$). Hal ini sesuai dengan hasil pengujian statistik yang membandingkan antara t hitung dengan t tabel, dimana nilai t hitung sebesar 5,339 dan t tabel yaitu sebesar 2,052 maka ($5,339 > 2,052$). Oleh karena itu, variable beban pajak tangguhan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.

4.2.4. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menentukan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependennya. Tujuan utama untuk mengukur besarnya pengaruh secara kuantitatif dari perubahan variabel dependen atas dasar nilai variabel independen. Hasil uji analisis regresi linier berganda disajikan pada Tabel 20.

Tabel 20
Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients	
	B	Std. Error
(Constant)	-14,486	12,440
1 Perencanaan Pajak	16,945	16,580
Beban Pajak Tangguhan	445,362	83,410

a. Dependent Variable: Manajemen Laba

(Sumber : Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 21, Tahun 2017)

Hasil pada Tabel 18 dapat dibuat model persamaan regresi linear berganda sebagai berikut.

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

$$Y = -14,486 + 16,954TRR + 445,362BBNPJK + e$$

Keterangan:

Y = Manajemen Laba

a = Nilai Konstanta

X₁ = Perencanaan Pajak

X₂ = Beban Pajak Tangguhan

b₁ = Koefisien regresi variabel perencanaan pajak

b₂ = Koefisien regresi variabel beban pajak tangguhan

e = *Disturbance error*

Dari persamaan model regresi linier berganda tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1) Konstanta

Konstanta sebesar -14,486 artinya jika perencanaan pajak dan beban pajak tangguhan nilainya adalah 0, maka penghindaran pajak nilainya negatif sebesar -14,486.

2) Koefisien Regresi Variabel Perencanaan Pajak

Nilai koefisien regresi variabel perencanaan pajak (b₁) bernilai positif sebesar 16,945. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan pajak memiliki hubungan yang searah dengan manajemen laba. Artinya apabila perencanaan pajak naik sebesar satu satuan sedangkan variabel lainnya dianggap konstan, maka perencanaan pajak mengalami kenaikan sebesar 16,945 satuan.

3) Koefisien Regresi Variabel Beban Pajak Tangguhan

Nilai koefisiensi regresi variabel beban pajak tangguhan (b₂) bernilai positif sebesar 445,362. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan pajak memiliki hubungan yang searah dengan manajemen laba. Artinya apabila beban pajak tangguhan naik sebesar satu satuan sedangkan variabel lainnya dianggap konstan, maka beban pajak tangguhan akan mengalami kenaikan sebesar 445,362 satuan.

4.3. Pembahasan

4.3.1. Pengaruh perencanaan pajak dan beban pajak tangguhan terhadap manajemen laba pada sub sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di BEI.

Hasil didasarkan pada penelitian yang telah diuraikan secara statistik dengan menggunakan SPSS versi 21.0 dengan uji f (simultan) dan uji t (parsial). Hasil dari hipotesis penelitian disajikan pada tabel 21.

Tabel 21
Hasil Pengujian Hipotesis

Kode	Hipotesis	Hasil Uji Hipotesis
H ₁	Perencanaan pajak tidak berpengaruh terhadap manajemen laba	Ditolak
H ₂	Beban pajak tangguhan berpengaruh terhadap manajemen laba	Diterima

Tabel 21 Menjelaskan mengenai hasil dari hipotesis penelitian sehingga menghasilkan hipotesis yang diterima atau ditolak.

1) H₁ : Ditolak

Nilai signifikansi perencanaan pajak sebesar 0,316 lebih dari 0,05 (sig.t > 0,05). Sehingga kesimpulannya bahwa perencanaan pajak tidak berpengaruh terhadap manajemen laba dan hipotesis ditolak.

2) H₂ : Diterima

Nilai signifikansi beban pajak tangguhan sebesar 0,000 kurang dari 0,05 (sig.t < 0,05). Sehingga kesimpulannya bahwa beban pajak tangguhan berpengaruh terhadap manajemen laba dan hipotesis diterima.

4.4. Interpretasi Hasil Penelitian

Dengan dilakukannya pengujian hipotesis dan statistik oleh penulis pada sepuluh perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2013-2015 dengan menggunakan alat bantu SPSS versi 21.0 tentang pengaruh perencanaan pajak dan beban pajak tangguhan terhadap manajemen laba maka penulis menginterpretasikan hasil penelitian yang diperkuat dengan teori-teori yang ada dan hasil penelitian-penelitian sebelumnya sebagai berikut.

4.4.1. Pengaruh Perencanaan Pajak terhadap Manajemen Laba

Berdasarkan hasil penelitian ini, perencanaan pajak yang dihitung menggunakan indikator *tax retention rate* dan manajemen laba yang dihitung menggunakan indikator *scale earnings change* tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Hal ini dibuktikan dengan pengujian statistik pada uji t dimana nilai signifikansi $0,316 > 0,05$ dan nilai dari ($t_{hitung} < t_{tabel}$) ($1,022 < 2,052$). Koefisien regresi yang positif (16,945) menunjukkan adanya hubungan positif antara perencanaan pajak terhadap manajemen laba pada sepuluh perusahaan makanan dan minuman. Hubungan positif yang ditunjukkan oleh perencanaan pajak berarti peningkatan perencanaan pajak mempengaruhi peningkatan peluang serta probabilitas perusahaan dalam melakukan manajemen laba. Salah satu perencanaan pajak adalah dengan cara mengatur seberapa besar laba yang dilaporkan, sehingga masuk dalam indikasi adanya praktik manajemen laba.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ferry Aditama dan Anna Purwaningsih (2014) yang menyatakan bahwa perencanaan pajak tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.

4.4.2. Pengaruh Beban Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba

Berdasarkan hasil penelitian ini, beban pajak tangguhan yang dihitung menggunakan indikator *DTE* berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Hal ini dibuktikan dengan pengujian statistik pada uji t dimana nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ dan nilai dari ($t_{hitung} > t_{tabel}$) ($5,339 > 2,052$). Koefisien regresi yang positif (445,362) menunjukkan adanya hubungan positif antara beban pajak tangguhan terhadap manajemen laba pada sepuluh perusahaan makanan dan minuman. Hubungan positif yang ditunjukkan oleh beban pajak tangguhan berarti semakin besar beban pajak tangguhan, maka semakin besar peluang perusahaan melakukan praktik manajemen laba. Artinya adanya indikasi praktek manajemen laba (*Earning Management*) untuk menghindari penurunan laba pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Yana Ulfah (2013) yang menyatakan bahwa beban pajak tangguhan berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh perencanaan pajak dan beban pajak tanggungan terhadap manajemen laba. Penelitian ini menggunakan 10 sampel perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2013-2015. Analisis dan pembahasan yang telah dilakukan menggunakan regresi linier berganda. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab IV, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Perencanaan Pajak (TRR) yang terjadi dari tahun 2013-2015 cenderung mengalami penurunan dimana pada tahun 2013 sebesar 0,7490, sedangkan tahun 2014 sebesar 0,7449, dan tahun 2015 sebesar 0,7409. Ini menunjukkan bahwa perusahaan sektor makanan dan minuman tetap melakukan perencanaan pajak yang tujuannya untuk meminimalkan kewajiban pajak, ini terbukti dari hasil perhitungan rata-rata bahwa TRR tidak lebih dari 1, yang artinya penggunaan laba bersih (*Net Income*) tidak lebih dari laba sebelum pajak (*Pretax Income*) dalam perencanaan pajak.
- 2) Beban Pajak Tanggungan (DTE) yang terjadi dari tahun 2013-2015, bahwa pada tahun 2013 beban pajak tanggungan memiliki nilai sebesar 0,0065 kemudian mengalami penurunan di tahun 2014 menjadi 0,0040, dan mengalami peningkatan kembali di tahun 2015 sebesar 0,0041. Peningkatan ini menunjukkan bahwa terjadinya beban pajak tanggungan yang semakin tinggi akibat adanya perbedaan antara standar akuntansi keuangan dengan peraturan perpajakan. Karena secara teori semakin tinggi perbedaan antara standar akuntansi keuangan dengan peraturan perpajakan maka semakin tinggi diskresi manajemen, diskresi manajemen ini terefleksikan dalam beban pajak tanggungan.
- 3) Pengujian yang telah dilakukan terhadap hasil uji f secara simultan variabel independen f hitung sebesar 14,260. Dengan menggunakan tingkat keyakinan 95% $\alpha = 5\%$, df 1 (jumlah variabel-1) = 2, dan df 2 (n-k-1) atau 30-2-1=27 (n adalah jumlah data observasi dan k adalah jumlah variabel independen), sehingga diperoleh f tabel sebesar 3,354 atau ($f_{hitung} > f_{tabel}$) (14,260 > 3,354). Jika dilihat dari signifikansi didapat nilai sebesar 0,000 (Sig.< 0,05). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kedua variabel independen yaitu perencanaan pajak dan beban pajak tanggungan secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap manajemen laba.

Pengujian yang telah dilakukan secara parsial antara perencanaan pajak dan beban pajak tangguhan terhadap manajemen laba memberikan hasil bahwa :

- a) Variabel Perencanaan Pajak memiliki nilai signifikan yang dihasilkan yaitu 0,316 dan t_{hitung} sebesar 1,022. Karena signifikansi pada uji t lebih dari 0,05 ($0,316 > 0,05$) dimana nilai ($t_{hitung} < t_{tabel}$) ($1,022 < 2,052$) maka dapat disimpulkan bahwa variabel Perencanaan Pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan. Artinya perusahaan melakukan manajemen laba dengan menghindari penurunan laba bertujuan untuk memangkas besarnya laba kena pajak perusahaan, selain itu sepertinya perusahaan kurang merespon penurunan tarif pajak atau PPh badan yang telah diatur dalam UU No. 36 Tahun 2008. Akan tetapi, hasil pada analisis deskriptif menunjukkan bahwa memang terjadi manajemen laba dengan tujuan untuk menghindari pelaporan kerugian atau menghindari penurunan laba.
- b) Variabel Beban Pajak Tangguhan memiliki nilai signifikan yang dihasilkan yaitu 0,000 kurang dari taraf nyata 0,05 atau ($0,000 < 0,05$) dan t_{hitung} sebesar 5,339 dan t tabel yaitu sebesar 2,052 ($t_{hitung} > t_{tabel}$) ($5,339 > 2,052$) maka dapat disimpulkan bahwa variabel Beban Pajak Tangguhan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan. Artinya setiap kenaikan beban pajak tangguhan, maka probabilitas perusahaan dalam melakukan manajemen laba akan mengalami peningkatan. Perbedaan temporer muncul dari komponen akrual dan arus kas operasi. Karena adanya perbedaan temporer itulah beban pajak tangguhan berpengaruh dalam usaha untuk mendeteksi pengaruh rekayasa akrual untuk meminimalkan pajak dalam manajemen laba.

5.2. Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan penulis untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan

Perencanaan Pajak dan Beban Pajak Tangguhan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap indikasi tindakan praktik manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan. Tindakan manajemen laba mempengaruhi besar kecilnya laba bersih yang didapatkan oleh perusahaan dalam satu periode. Sebaiknya Laba (*Net Income*) dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi perusahaan untuk melihat kelangsungan hidup perusahaan tersebut dan dapat dijadikan dasar pertimbangan mengambil keputusan untuk periode yang akan datang.

2. Bagi Investor

Perencanaan Pajak dan Beban Pajak Tangguhan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap indikasi tindakan praktik manajemen laba dengan mempengaruhi besar kecilnya laba yang di dapat oleh perusahaan dalam satu periode. Sebaiknya investor sebagai salah satu pemilik modal terlebih dahulu dapat mengetahui sinyal manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan sehingga dapat mengambil keputusan yang tepat atas resiko investasinya dan menentukan pilihan atas investasi pada perusahaan makanan dan minuman.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas penelitian dengan menambahkan sampel yang tidak hanya terfokus pada sektor makanan dan minuman saja, sehingga dapat diperoleh hasil penelitian yang lebih akurat. Selain itu penelitian hendaknya menganalisis praktek manajemen laba yang dilakukan perusahaan tidak hanya pada perencanaan pajak dan beban pajak tangguhan tetapi juga pada komponen lain yang terindikasi terdapat praktek manajemen laba yang dilakukan perusahaan. Penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan model lain selain model pendekatan distribusi laba sebagai pendeteksi manajemen laba, sehingga dapat dibandingkan antar model yang lebih baik dalam mendeteksi manajemen laba pada sampel yang diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

- Beni Ahmad Saebani (2008) *Metode Penelitian*, Bandung Penerbit CV Pustaka Setia.
- Christina Ranty Sumomba (2010). *Pengaruh Beban Pajak Tangguhan dan Perencanaan Pajak terhadap Praktik Manajemen Laba pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia*. Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Diana Sari (2014), *Perpajakan konsep teori dan aplikasi pajak penghasilan (edisi asli)*. Jakarta, Mitra Wacana Media.
- Diaz Priantara (2012), *Perpajakan Indonesia (ed 2)*. Jakarta, Mitra Wacana Media.
- Dwi Perwira Sianturi (2016). *Pengaruh Beban Pajak Tangguhan dan Perencanaan Pajak terhadap Manajemen Laba (Study Empiris pada Perusahaan Non Manufaktur Subsektor Pertambangan Batu Bara yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia)*. Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan Bandung: Skripsi Tidak Diterbitkan.
- Erly Suandy (2011), *Perencanaan Pajak (ed 5)*. Yogyakarta, Salemba Empat.
- Erly Suandy (2016), *Perencanaan Pajak (ed 6)*. Yogyakarta, Salemba Empat.
- Ferry Aditama dan Anna Purwaningsih (2014). *Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba, Modus Vol.26 (I): 33-50, 2014*.
- Herdawati (2016). *Tinjauan Perencanaan Pajak dan Beban Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba pada perusahaan sub sector manufaktur tahun 2012-2014*. Universitas Hasanuddin.
- Herry Purwono (2010), *Dasar-dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak*. Jakarta, Penerbit Erlangga.
- Hery (2015). *Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta: CAPS.
- Imam Ghojali (2009) *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*, Semarang Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Jayanto, Prabowo Yud dan Kiswanto, 2009. *Deffered Tax and Accruals dalam memprediksi Earning Manajemen (Penelitian Empiris pada Persahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia)*. Simposiaum Nasional Perpajakan.
- Lumbantoruan, Sophar (1996). *Akuntansi Pajak, Edisi Revisi*. Jakarta: PT Grasindo.
- Noegroho Boedijoewono (2016) *Pengantar Statistika Ekonomi dan Bisnis (ed 7)*, Yogyakarta Penerbit Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Phillips, John., M. Pincus and S. Rego. 2003. *Earning Management: New Evidence Based on Deferred Tax Expense*. The Accounting Review, vol 78, pp.491-521.

- Pohan, Chairil Anwar (2014). *Perpajakan Indonesia (edisi asli)*. Jakarta, PT Mitra Wacana Media.
- Pohan, Chairil Anwar (2015). *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak Dan Bisnis*. Edisi Revisi, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama.
- Purba, Marisi P (2009). *Akuntansi Pajak Penghasilan*. Yogyakarta, Graha Ilmu.
- Rachmat Trijono (2015) *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Ed 2)*, Depok Timur Penerbit Papas Sinar Sinanti.
- Rachmawati, YR. 2011. *Determinasi Besaran Penyisihan Aktiva Pajak Tangguhan sebagai Instrumen Manajemen Laba*. Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro: Skripsi Tidak Diterbitkan.
- Riyan Rizki Perdana (2014). *Pengaruh Beban Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba (Study Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2012)*. Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor: Skripsi Tidak Diterbitkan.
- Siti Resmi (2014). *Perpajakan : Teori dan Kasus*. Jakarta : Salemba Empat.
- Soemarso (2015). *Akuntansi Suatu Pengantar, Edisi revisi*. Jakarta. Salemba Empat.
- Sofyan Syafri Harahap (2012), *Teori Akuntansi*, Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Sukrisno Agoes dan Estralita Trisnawati (2012), *Akuntansi Perpajakan, Edisi 2 revisi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sulistyanto (2008). *Manajemen Laba: Teori dan Model Empiris*. Jakarta: Grasindo.
- Tiara Timuriana dan Rezwan Rizki Muhamad. (2015), *Pengaruh Aset Pajak Tangguhan dan Beban Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba, Vol. 1 No.2 , 12-20*. Universitas Pakuan Bogor.
- V. Wiratna Sujarweni (2014), *SPSS untuk Penelitian*. Pustaka Baru Press: Yogyakarta
- Waluyo (2013). *Perpajakan Indonesia, Edisi 11*. Jakarta. Salemba Empat.
- Yana Ulfah (2013). *Pengaruh Beban Pajak Tangguhan dan Perencanaan Pajak terhadap Praktek Manajemen Laba pada Perusahaan Manufaktur Tahun 2009-2011*. Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman Samarinda.

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I

Perencanaan Pajak (*Tax Retention Rate*)

$$\text{Tax Retention Rate (TRR)} = \frac{\text{Net Income}_{it}}{\text{Pretax Income (EBIT)}_{it}}$$

KODE	2013	2014	2015	MEAN
CEKA	0,751780433	0,721011157	0,74891708	0,740569557
DLTA	0,754746345	0,75903563	0,76757367	0,760451881
INDF	0,731715606	0,707273526	0,651281397	0,696756843
MLBI	0,74272026	0,737109808	0,735538181	0,738456083
MYOR	0,780502636	0,773934786	0,762107356	0,772181593
ROTI	0,749580621	0,746066319	0,715234753	0,736960564
SKBM	0,744102575	0,812366648	0,748660787	0,76837667
SKLT	0,689249428	0,701035834	0,733000337	0,707761866
STTP	0,801385222	0,736023473	0,800434827	0,779281174
ULTJ	0,744475364	0,754915805	0,746565852	0,74865234
MEAN	0,749025849	0,744877299	0,740931424	
MAX	0,801385222	0,812366648	0,800434827	
MIN	0,689249428	0,701035834	0,651281397	

(Sumber : www.idx.co.id diolah oleh penulis, tahun 2017)

LAMPIRA II

Beban Pajak Tangguhan (*Deferred Tax Expense*)

$$Deferred\ Tax\ Expense\ (DTE)_{it} = \frac{Beban\ Pajak\ Tangguhan_t}{Total\ Aset_{t-1}}$$

KODE	2013	2014	2015	MEAN
CEKA	0,001563352	0,001035482	0,000488034	0,001028956
DLTA	0,007391192	0,000482585	0,005088291	0,004320689
INDF	0,008471629	0,005191555	0,004414856	0,006026013
MLBI	0,034064553	0,006579139	0,016327178	0,01899029
MYOR	0,000050067	0,000354744	0,000337294	0,000247369
ROTI	0,001448158	0,00869975	0,004454876	0,004867595
SKBM	0,001605013	0,002376097	0,000215941	0,001399017
SKLT	0,004272857	0,006040435	0,003475288	0,004596193
STTP	0,001157443	0,002002789	0,001615307	0,001591846
ULTJ	0,004573838	0,007467188	0,004805993	0,005615673
MEAN	0,00645981	0,004022977	0,004122306	
MAX	0,034064553	0,00869975	0,016327178	
MIN	0,000050067	0,000354744	0,000215941	

(Sumber : www.idx.co.id diolah oleh penulis, tahun 2017)

LAMPIRAN III
Manajemen Laba

$$Scales\ Earning\ Changes_{it} = \frac{Net\ Income_{it} - Net\ Income_{i(t-1)}}{Market\ Value\ Equity_{i(t-1)}}$$

KODE	2013	2014	2015	MEAN
CEKA	0,034775545	-0,139481562	0,293772693	0,063022225
DLTA	0,013977942	0,002958305	-0,015444676	0,00049719
INDF	-0,026565694	0,018452873	-0,021133404	-0,009748742
MLBI	18,9938365	-10,36229631	-0,011834391	2,873235266
MYOR	0,023892961	-0,032552017	0,044972189	0,012104378
ROTI	0,006346	0,005933152	0,011680945	0,007986699
SKBM	0,137223036	0,07659033	-0,054977843	0,052945174
SKLT	0,027967734	0,043560007	0,015494573	0,029007438
STTP	0,028942846	0,004530144	0,016451886	0,016641626
ULTJ	-0,007367914	-0,003236413	0,022340033	0,003911902
MEAN	1,923302896	-1,03855415	0,030132200	
MAX	18,9938365	0,07659033	0,293772693	
MIN	-0,026565694	-10,36229631	-0,054977843	

(Sumber : www.idx.co.id diolah oleh penulis, tahun 2017)

LAMPIRAN II

1) Analisis Statistik Deskriptif

Analisis Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Perencanaan Pajak	30	,6512814	,8123666	,744944857	,0329304168
Beban Pajak Tangguhan	30	,0000501	,0340646	,004868364	,0065459745
Manajemen Laba	30	-10,3622963	18,9938365	,304960316	4,0064526601
Valid N (listwise)	30				

(Sumber : Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 21, Tahun 2017)

2) Hasil Uji Normalitas Kolmogrov-smirnov Test

Hasil Uji Normalitas Kolmogrov-smirnov Test

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Perencanaan Pajak	Beban Pajak Tangguhan	Manajemen Laba	Unstandardized Residual
N		30	30	30	30
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,744944857	,004868364	,304960316	,0000000
	Std. Deviation	,0329304168	,0065459745	4,006452660	2,79396522
Most Extreme Differences	Absolute	,144	,231	,468	,226
	Positive	,114	,214	,468	,218
	Negative	-,144	-,231	-,423	-,226
Kolmogorov-Smirnov Z		,788	1,264	2,562	1,240
Asymp. Sig. (2-tailed)		,563	,082	,000	,092

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

3) Hasil Uji Heterokedastitas dengan Uji Gleser

Hasil Uji Heterokedastitas dengan Uji Gleser

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	1,060	8,655		,123	,903
1 PERENCANAAN PAJAK	-,244	11,536	-,004	-,021	,983
BEBAN PAJAK TANGGUHAN	162,781	58,034	,481	2,805	,009

a. Dependent Variable: RES2

(Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 21, Tahun 2017)

4) Hasil uji Multikolonieritas

Hasil uji Multikolonieritas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	-14,486	12,440		-1,165	,254		
1 Perencanaan Pajak	16,945	16,580	,139	1,022	,316	,970	1,031
Beban Pajak Tangguhan	445,362	83,410	,728	5,339	,000	,970	1,031

a. Dependent Variable: Manajemen Laba

(Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 21, Tahun 2017)

5) Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,717 ^a	,514	,478	2,8955969654	2,288

a. Predictors: (Constant), Beban Pajak Tangguhan, Perencanaan Pajak

b. Dependent Variable: Manajemen Laba

(Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 21, Tahun 2017)

6) Uji Koefisien Determinasi

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,717 ^a	,514	,478	2,8955969654	2,288

a. Predictors: (Constant), Beban Pajak Tangguhan, Perencanaan Pajak

b. Dependent Variable: Manajemen Laba

(Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 21, Tahun 2017)

7) Hasil Uji Koefisien Regresi Secara Bersama-sama (Uji f)

Hasil Uji Koefisien Regresi Secara Bersama-sama (Uji f)

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	239,117	2	119,559	14,260	,000 ^b
Residual	226,381	27	8,384		
Total	465,498	29			

a. Dependent Variable: Manajemen Laba

b. Predictors: (Constant), Beban Pajak Tangguhan, Perencanaan Pajak

(Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 21, Tahun 2017)

8) Hasil Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t)

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-14,486	12,440		-1,165	,254
1 Perencanaan Pajak	16,945	16,580	,139	1,022	,316
Beban Pajak Tangguhan	445,362	83,410	,728	5,339	,000

a. Dependent Variable: Manajemen Laba

(Sumber : Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 21, Tahun 2017)

9) Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients	
	B	Std. Error
(Constant)	-14,486	12,440
1 Perencanaan Pajak	16,945	16,580
Beban Pajak Tangguhan	445,362	83,410

a. Dependent Variable: Manajemen Laba

(Sumber : Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 21, Tahun 2017)